



| 2024



LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaivdah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 14 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran	vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
A. PENJELASAN UMUM.....	10
B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	28
C. PENJELASAN ATAS POS NERACA.....	45
D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL	84
E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	96
F. PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	84



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 14 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 1.2	Ringkasan Neraca	2
Tabel 1.3	Ringkasan Laporan Operasional	3
Tabel 1.4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas	3
Tabel 1.5	Daftar Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	16
Tabel 1.6	Tabel Kualitas Piutang dan Penyisihan	21
Tabel 1.7	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	23
Tabel 1.8	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	24
Tabel 2.1	Perubahan Target Pendapatan/Pagu Anggaran Belanja Tahun 2024	27
Tabel 2.2	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2024 dan 2023	28
Tabel 2.3	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya Tahun 2024 dan 2023	29
Tabel 2.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023	31
Tabel 2.5	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023	32
Tabel 2.6	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023	33
Tabel 2.7	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023	34
Tabel 2.8	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dan 2023	34
Tabel 2.9	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023	35
Tabel 2.10	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	36
Tabel 2.11	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 dan 2023	37
Tabel 3.1	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023	39
Tabel 3.2	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Tabel 3.3	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	41
Tabel 3.4	Rincian Kas pada Badan Layanan Umum	42
Tabel 3.5	Rincian Piutang Bukan Pajak	43
Tabel 3.6	Rincian Penyelesaian Piutang Bukan Pajak SRUT	44
Tabel 3.7	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	45
Tabel 3.8	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	45
Tabel 3.9	Rincian Persediaan	46
Tabel 3.10	Rincian Aset Tetap Lainnya	55
Tabel 3.11	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	57
Tabel 3.12	Rincian Aset Konsesi Jasa	57
Tabel 3.13	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	58
Tabel 3.14	Rincian Aset Tak Berwujud	59

Tabel 3.15	Rincian Aset Lain-lain	62
Tabel 3.16	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	63
Tabel 3.17	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	65
Tabel 4.1	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	67
Tabel 4.2	Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum	68
Tabel 4.3	Rincian Beban Pegawai	69
Tabel 4.4	Rincian Beban Persediaan	70
Tabel 4.5	Rincian Beban Barang dan Jasa	71
Tabel 4.6	Rincian Beban Pemeliharaan	72
Tabel 4.7	Rincian Beban Perjalanan Dinas	73
Tabel 4.8	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	74
Tabel 4.9	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	75
Tabel 4.10	Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	76
Tabel 5.1	Rincian Koreksi Lainnya	79
Tabel 5.2	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Bukti Setor Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP/TUP)
Lampiran II	Bukti Setor Kas Lainnya dan Setara Kas (Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor)
Lampiran III	Rincian Piutang PNBPN dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran IV	Rincian Persediaan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
Lampiran V	Rincian Tanah
Lampiran VI	Rincian Aset Tetap Renovasi
Lampiran VII	Rincian Aset Tetap Lainnya
Lampiran VIII	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran IX	Rincian Aset Konsesi Jasa
Lampiran X	Rincian Aset Tak Berwujud
Lampiran XI	Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Lampiran XII	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Lampiran XIII	Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Lampiran XIV	Rincian Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Lampiran XV	Rincian BMN Dalam Proses PMPP
Lampiran XVI	Rincian Transaksi Transfer Keluar-Transfer Masuk
Lampiran XVII	Realisasi Belanja Melebihi Pagu Belanja (Pagu Minus)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini, meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp1.329.495.720.166** atau mencapai **88,83 persen** dari target pendapatan sebesar **Rp1.496.612.998.000**. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp6.339.489.007.922** atau mencapai **93,91 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp6.750.298.621.000**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)		31 Desember 2023 (Audited)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.496.612.998.000	1.329.495.720.166	1.440.399.979.000	1.374.783.594.977
Belanja	6.750.298.621.000	6.339.489.007.922	5.811.375.020.000	5.722.459.332.818

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 (*Audited*) dicatat dan disajikan sebesar **Rp19.810.627.590.995** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp2.634.522.918.827**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp15.419.280.150.319**; Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp0** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp1.756.824.521.849**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp1.349.269.288.185** dan **Rp18.461.358.302.810**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 1.2 Ringkasan Neraca

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	
Aset			
Aset Lancar	2.634.522.918.827	3.221.974.215.893	(587.451.297.066)
Aset Tetap	15.419.280.150.319	13.744.609.623.806	1.674.670.526.513
Piutang Jangka Panjang	0	23.884.265	(23.884.265)
Aset Lainnya	1.756.824.521.849	2.020.114.111.152	(391.464.601.014)
Jumlah Aset	19.810.627.590.995	18.986.721.835.116	823.905.755.879
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	248.664.118.185	224.278.693.203	24.385.424.982
Kewajiban Jangka Panjang	1.100.605.170.000	0	1.100.605.170.000
Ekuitas			
Ekuitas	18.461.358.302.810	18.762.443.141.913	(301.084.839.103)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	19.810.627.590.995	18.986.721.835.116	823.905.755.879

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited) adalah sebesar **Rp1.238.929.573.799** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp5.925.256.290.946** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp4.686.326.717.147**. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp604.646.182.332** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp5.290.972.899.479**.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 1.3 Ringkasan Laporan Operasional

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional	1.238.929.573.799	1.320.343.843.333	(81.414.269.534)
Beban Operasional	5,925,256,290,946	6.299.416.558.419	(374,160,267,473)

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(4.686.326.717.147)	(4.979.072.715.086)	292.745.997.939
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(618.479.127.972)	(363.797.577.801)	(254.681.550.171)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13.832.945.640	(42.295.735.469)	56.128.681.109
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(604.646.182.332)	(406.093.313.270)	(198.552.869.062)
Surplus (Defisit) – LO	(5.290.972.899.479)	(5.385.166.028.356)	94.193.128.877

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar **Rp18.762.443.141.913** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp5.290.972.899.479** dikurangi dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas senilai **Rp39.698.428.263** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp5.029.586.488.639** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp18.461.358.302.810**.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 1.4 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Ekuitas Awal	18.762.443.141.913	19.655.203.097.831	(892.759.955.918)
Surplus (Defisit) – LO	(5.290.972.899.479)	5.385.166.028.356	94.193.128.877
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(39.698.428.263)	(11.565.025.647)	(28.133.402.616)
Transaksi Antar Entitas	5.029.586.488.639	4.503.971.098.085	525.615.390.554
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(301.084.839.103)	(892.759.955.918)	591.675.116.815
Ekuitas Akhir	18.461.358.302.810	18.762.443.141.913	(301.084.839.103)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)		%	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA					
Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan BLU	B.1	20.781.280.000	17.626.859.900	84,82	21.367.830.397
Pendapatan PNPB Lainnya	B.2	1.475.831.718.000	1.311.868.860.266	88,89	1.353.415.764.580
JUMLAH PENDAPATAN		1.496.612.998.000	1.329.495.720.166	88,83	1.374.783.594.977
BELANJA NEGARA	B.3				
Belanja Pemerintah Pusat					
Belanja Pegawai	B.4	665.206.211.000	661.720.639.858	99,48	560.902.286.762
Belanja Barang	B.5	3.797.185.479.000	3.545.515.481.874	93,37	3.178.184.404.295
Belanja Modal	B.6	2.287.906.931.000	2.132.252.886.190	93,20	1.983.372.641.761
JUMLAH BELANJA		6.750.298.621.000	6.339.489.007.922	93,91	5.722.459.332.818

Jakarta, 14 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	744.819.613	146.455.531
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	16.034.950	53.053.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	119.279.552	657.932.501
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	8.859.114.365	9.938.505.875
Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	C.5	37.323.750	111.971.250
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	13.208.500	319.329.600
Piutang Bukan Pajak	C.7	8.098.018.599	6.523.825.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	(8.075.946.007)	(6.523.825.000)
Persediaan	C.9	2.624.711.065.505	3.210.746.968.136
Jumlah Aset Lancar		2.634.522.918.827	3.221.974.215.893
ASET TETAP			
Tanah	C.10	2.514.097.267.663	2.523.030.687.695
Peralatan dan Mesin	C.11	9.157.630.701.501	8.748.276.279.951
Gedung dan Bangunan	C.12	6.759.595.073.288	5.937.512.411.387
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.13	2.855.901.415.298	2.803.235.837.451
Aset Tetap Lainnya	C.14	187.338.611.686	208.760.285.317
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	1.264.965.616.632	971.159.012.851
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(8.428.150.013.150)	(7.633.960.973.173)
Aset Konsesi Jasa	C.17	1.167.531.713.498	283.558.253.098
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.18	(59.630.236.097)	(96.962.170.771)
Jumlah Aset Tetap		15.419.280.150.319	13.744.609.623.806
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.19	0	24.004.286
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.20	0	(120.021)
Jumlah Aset Tetap		0	23.884.265
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	782.361.028.048	760.184.388.326
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.22	0	9.839.577.483
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.23	355.597.225.461	334.103.417.063
Aset Lain-Lain	C.24	1.740.689.786.729	2.132.154.387.743
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(1.121.823.518.389)	(1.216.167.659.463)
Jumlah Aset Lainnya		1.756.824.521.849	2.020.114.111.152
JUMLAH ASET		19.810.627.590.995	18.986.721.835.116

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	247.866.130.020	223.828.212.864
Pendapatan Diterima Dimuka	C.27	17.675.000	303.539.188
Uang Muka dari KPPN	C.28	744.819.613	146.455.531
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	35.493.552	485.620
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		248.664.118.185	224.278.693.203
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Konsesi Jasa	C.30	1.100.605.170.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.100.605.170.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN			
		1.349.269.288.185	224.278.693.203
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	18.461.358.302.810	18.762.443.141.913
JUMLAH EKUITAS			
		18.461.358.302.810	18.762.443.141.913
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		19.810.627.590.995	18.986.721.835.116

Jakarta, 14 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN
31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.221.248.296.201	1.320.343.843.333
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.2	17.681.277.598	0
JUMLAH PENDAPATAN		1.238.929.573.799	1.320.343.843.333
BEBAN			
Beban Pegawai	D.3	661.720.639.858	560.902.286.762
Beban Persediaan	D.4	55.177.229.364	72.668.601.439
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.518.121.755.638	2.305.355.604.699
Beban Pemeliharaan	D.6	297.156.124.341	208.652.493.645
Beban Perjalanan Dinas	D.7	335.100.875.386	288.640.496.158
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	883.034.290.525	1.657.935.682.182
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.174.945.384.937	1.205.180.021.813
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(9.103)	81.371.721
JUMLAH BEBAN		5.925.256.290.946	6.299.416.558.419
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.686.326.717.147)	(4.979.072.715.086)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	D.11	3.075.573.916	2.526.190.294
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(621.554.701.888)	(366.323.768.095)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		30.289.316.722	19.708.061.458
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(16.456.371.082)	(62.003.796.927)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(604.646.182.332)	(406.093.313.270)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.290.972.899.479)	(5.385.166.028.356)
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.290.972.899.479)	(5.385.166.028.356)

Jakarta, 14 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN
31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	E.1	18.762.443.141.913	19.655.203.097.831
Surplus/Defisit - LO	E.2	(5.290.972.899.479)	(5.385.166.028.356)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(39.698.428.263)	(11.565.025.647)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	70.605.218.228	134.108.111.777
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	1.557.835.069	(4.437.004.419)
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	(111.658.459.227)	(138.394.755.678)
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	(203.022.333)	(2.841.377.327)
Transaksi Antar Entitas	E.4	5.029.586.488.639	4.503.971.098.085
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(301.084.839.103)	(892.759.955.918)
EKUITAS AKHIR	E.5	18.461.358.302.810	18.762.443.141.913

Jakarta, 14 Mei 2025

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan (Revisi 2020);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi;
24. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3429/KU.202/DRJD/2018 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

26. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.6012/PL.201/DRJD/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemerintah Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

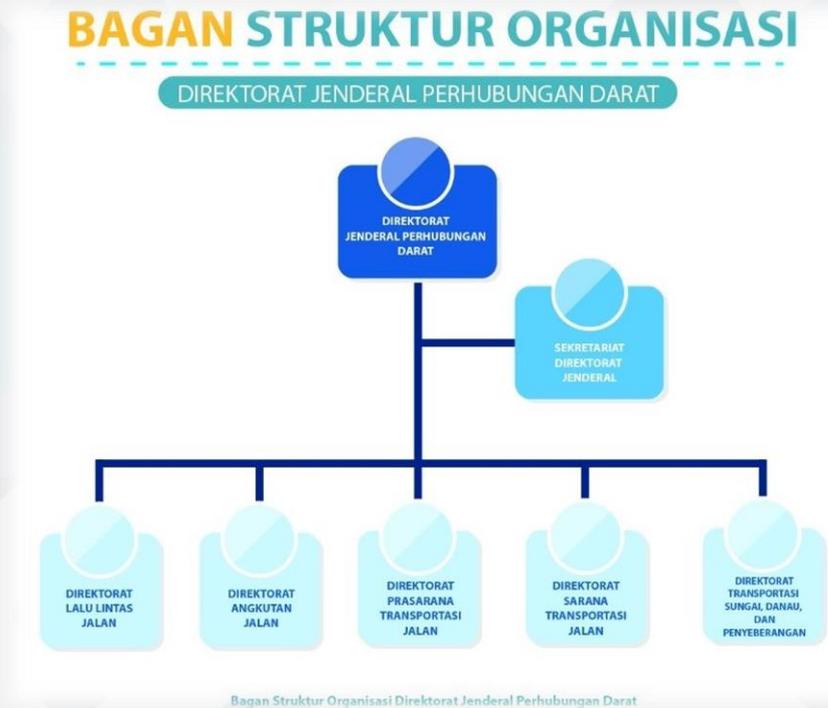
A.2 Profil, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Profil Entitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dapat digambarkan sebagai berikut:



a. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Lahir di Kuningan, 31 Januari 1967. Beliau merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1988.

Sebelum menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

b. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Lahir di Jakarta, 30 September 1965. Beliau menempuh pendidikan Diploma III dan Diploma IV Transportasi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD sekarang bernama PTDI-STTD) dan S2 di

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sebelum menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Beliau pernah menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat sekaligus Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).

c. DIREKTUR LALU LINTAS JALAN



Rudi Irawan, S.SiT., M.T.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Jalan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan.

d. DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



Dr. Muiz Thohir, S.T., M.T.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Angkutan Jalan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur.

e. DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Prasarana Transportasi Jalan.

f. DIREKTUR SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN



Yusuf Nugroho, S.T., M.T.

Sebelum menjadi Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor, dan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

**g. DIREKTUR SARANA, PRASARANA, ANGKUTAN SDP DAN
PENYEBERANGAN KESELAMATAN**



Sigit Widodo, S.T., M.T.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Sarana, Prasarana, Angkutan SDP dan Penyeberangan Keselamatan.
Sebelum menjadi Direktur Sarana, Prasarana, Angkutan SDP dan Penyeberangan Keselamatan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Profil Entitas

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan menggunakan system informasi manajemen keuangan yang terintegrasi yang didukung dengan sistem sakti.

Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam proses pelaporan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik negara, SAKTI menggunakan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 42 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Tabel 1.5 Daftar Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	
			KP	KD
1	412735	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	√	
2	352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	√	
3	352597	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	√	
4	352598	Direktorat Lalu Lintas Jalan	√	
5	352599	Direktorat Angkutan Jalan	√	
6	352600	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	√	
7	403849	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat **)		√
8	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah **)		√

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	
			KP	KD
9	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi *)	√	
10	403841	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh		√
11	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara		√
12	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat		√
13	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau		√
14	690663	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau		√
15	403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi		√
16	403846	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung		√
17	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan		√
18	403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten		√
19	690668	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I. Yogyakarta ***)		√
20	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur		√
21	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali		√
22	690664	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Barat		√
23	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur		√
24	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat		√
25	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan		√
26	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah		√
27	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur		√
28	403859	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tenggara		√
29	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan		√
30	403861	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah		√
31	403863	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo		√
32	403864	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara		√
33	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku		√
34	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara		√
35	690665	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua		√
36	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat		√
37	690666	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu		√
38	690667	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung		√
39	690669	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara **)		√
40	690670	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat **)		√
41	633001	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba		√
42	691166	Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi		√
Jumlah			7	35

Catatan:

*) Satker menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sejak Tahun 2022

**) Satker BPTD naik kelas menjadi BPTD Kelas I

***) Satker BPTD naik kelas menjadi BPTD Kelas II

A.4 Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
- LRA*

1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan PNBP Lainnya-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Khusus Pendapatan PNBP BLU-LRA, pengakuan Pendapatan terjadi pada saat pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas BLU dan disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
- LO*

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan BLU adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan BLU dalam kerangka keuangan negara merupakan kelompok pendapatan negara bukan pajak.
- c) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diakui setelah pengujian selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri diakui setelah pelayanan di pelabuhan penyeberangan selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Jasa Analisis Dampak Lalu Lintas diakui setelah persetujuan hasil analisis selesai dilaksanakan;

- Pendapatan Jasa Angkutan Jalan diakui setelah pelayanan angkutan jalan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan Jasa Sertifikasi Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi diakui setelah persetujuan pengoperasionalan kapal dan sertifikasi standar pelayanan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal BLU mendapatkan alokasi APBN dari DIPA RM, pengeluaran belanjanya dibayar dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
- c) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- e) Khusus untuk Belanja pada Satker BLU:
- 1) Belanja dari realisasi DIPA RM
Belanja dari realisasi DIPA RM diakui pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara sesuai dengan SPM/SP2D Belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal).
 - 2) Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNB

Belanja BLU dari pengesahan beban dan/atau biaya perolehan aset BLU diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU.

- f) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban BLU adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLU, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selain itu, terdapat beban yang timbul sehubungan dengan adanya penyeteroran BLU atas pendapatan PNPB ke Kas Negara.
- c) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- d) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Tabel Kualitas Piutang dan Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- 5) Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - disediakan oleh mitra, yang: (1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - disediakan oleh pemberi konsesi, yang: (1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.
- 6) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- 7) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi. Pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa, diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp1.329.495.720.166** atau mencapai **88.83** persen dari target Tahun 2024 sebesar **Rp1.496.612.998.000**. Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp17.626.859.900 dan Pendapatatatan PNBPN Lainnya sebesar Rp1.311.868.860.266.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp45.287.874.811 atau lebih rendah 3,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp1.374.783.594.977.

Perbandingan Realiasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 (dalam ribuan)



Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2024 sebesar Rp6.339.489.007.922 atau 93,91 persen dari pagu anggaran belanja sebesar Rp6.750.298.621.000. Realisasi Belanja Negara merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp661.720.639.858, Belanja Barang sebesar Rp3.545.515.481.874, dan Belanja Modal sebesar Rp2.132.252.886.190.

Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp617.029.675.104 atau lebih tinggi 10,78 persen dari Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp5.722.459.332.818. Penurunan persentase atas realisasi TA 2024 sebesar 94 persen dibandingkan dengan persentase realisasi TA 2023 sebesar 98 persen terjadi karena adanya kebijakan *automatic adjustment* (AA) yaitu pemblokiran anggaran sementara sebesar 5% dari anggaran kementerian dan lembaga yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp326.788.937.000 dan pemblokiran anggaran atas belanja perjalanan dinas senilai Rp11.669.135.000.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Belanja, dari DIPA Awal sebesar Rp6.665.179.695.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp6.750.298.621.000.

Sehingga Pagu Anggaran terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Target Pendapatan/Pagu Anggaran Belanja Tahun 2024

Uraian	Perubahan Pagu Anggaran 2024			
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan (Penurunan)	% Perubahan
PENDAPATAN				
Pendapatan PNBPN	1.496.612.998.000	1.496.612.998.000	0	0
BELANJA				
Belanja Pegawai	582.129.734.000	665.206.211.000	83.076.477.000	14,27
Belanja Barang	3.840.809.948.000	3.797.185.479.000	(43.624.469.000)	(1,14)
Belanja Modal	2.242.240.013.000	2.287.906.931.000	45.666.918.000	2,04
Jumlah Belanja	6.665.179.695.000	6.750.298.621.000	85.118.926.000	1,28

Penambahan pagu anggaran sebesar Rp85.118.926.000 dikarenakan adanya Penambahan Luncuran SBSN, penambahan akibat kekurangan Belanja Pegawai (Belanja 51) dan penambahan anggaran bersumber dari BLU.

Pendapatan
BLU
**Rp17,62
Miliar**

B.1 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp17.626.859.900** atau **84,82 persen** dari Target Pendapatan BLU sebesar **Rp20.781.280.000**. Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 menurun sebesar **Rp(3.740.970.497)** atau **17,51 persen** dari Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 sebesar **Rp21.367.830.397**.

Rincian realisasi PNPB BLU dijelaskan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan (Penurunan)	%
		2024	2023		
PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM					
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	20.781.280.000	16.947.905.000	21.277.765.500	(4.329.860.500)	(20,35)
PENDAPATAN BLU LAINNYA					
Komisi, Potongan dan/atau Bentuk Lain sebagai akibat dari Pengadaan	0	0	1.415.010	(1.415.010)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain BLU	0	295.810.289	16.438.387	279.371.902	1.699,51
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	72.557.500	70.357.500	2.200.000	3,13
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	0	1.854.000	(1.854.000)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	24.271.711	0	24.271.711	0
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	7.730.400	0	7.730.400	0
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	0	120.109.000	0	120.109.000	0
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	0	157.476.000	0	157.476.000	0
Jumlah	20.781.280.000	17.626.859.900	21.367.830.397	(3.740.970.497)	(17,51)

Realisasi Pendapatan BLU pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berasal dari jasa pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pada satuan kerja Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).

Penurunan realisasi Pendapatan BLU TA 2024 dibandingkan realisasi Pendapatan BLU TA 2023, disebabkan oleh adanya proses peningkatan (*upgrade*) Laboratorium UN R83 dan UN R101 pada BPLJSKB Bekasi. Peningkatan ini untuk sementara waktu mengurangi kapasitas pelayanan sehingga berpengaruh terhadap realisasi pendapatan TA

2024, namun diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang dan berdampak positif pada pendapatan.

B.2 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

*Pendapatan
PNBP
Lainnya
Rp1,31
Triliun*

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp1.311.868.860.266** atau **88,89 persen** dari Target Pendapatan PNBP Lainnya sebesar **Rp1.475.831.718.000**. Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2024 menurun sebesar **Rp41.546.904.314** atau **3,07 persen** dari Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2023 sebesar **Rp1.353.415.764.580**.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berasal dari Jasa Pelayanan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Jasa Kalibrasi Bidang Perhubungan, Jasa Kepelabuhanan, Jasa Transportasi Lainnya, Pendapatan dari Penjualan BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Penjualan Peralatan dan Mesin, Pengelolaan BMN berupa Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan (Penurunan)	%
		2024	2023		
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN	5.405.716.000	12.661.207.708	15.912.536.719	(3.251.329.011)	(0,20)
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	0	105.424.160	(105.424.160)	(1,00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	57.534.000.000	41.074.200.001	58.332.000.001	(17.257.800.000)	(0,30)
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.350.906.095.000	1.084.608.990.000	1.141.807.995.000	(57.199.005.000)	(0,05)
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	5.316.483.000	6.997.230.106	5.825.047.325	1.172.182.781	0,20
Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	25.000.000	31.384.000	31.123.000	261.000	0,01
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	2.400.624.000	5.508.987.503	4.579.101.890	929.885.613	0,20
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	54.243.800.000	64.883.147.235	68.515.479.230	(3.632.331.995)	(0,05)
Pendapatan Jasa Lainnya	0	4.137.684	14.180.780	(10.043.096)	(0,71)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	0	27.505.520	4.800.000	22.705.520	4,73
Pendapatan Denda	0	7.596.106.590	3.667.678.136	3.928.428.454	1,07
Pendapatan Lain-lain	0	88.475.963.919	54.620.398.339	33.855.565.580	0,62
Jumlah	1.475.831.718.000	1.311.868.860.266	1.353.415.764.580	(41.546.904.314)	(0,03)

Pendapatan PNBP yang paling signifikan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berasal dari satker:

1. Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp1.117.567.753.814 dengan rincian nilai signifikan:
 - a. Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp34.954.200.000;
 - b. Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.081.283.780.000;
 - c. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1.028.182.014.
2. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp67.585.133.893 dengan rincian nilai signifikan:

- a. Pendapatan jasa transportasi lainnya sebesar Rp61.150.294.600 yang merupakan jasa angkutan berupa izin penyelenggaraan angkutan orang dan barang, serta penerbitan kartu pengawasan;
 - b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp5.602.622.633;
 - c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp400.677.960.
3. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp19.623.804.096 dengan rincian nilai signifikan:
- a. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp8.458.963.925;
 - b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan sebesar Rp6.120.000.001;
 - c. Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan sebesar Rp3.494.522.503;
 - d. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1.027.821.584.
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Riau sebesar Rp17.984.117.601 dengan nilai signifikan terdiri dari:
- a. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp12.525.300.880;
 - b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp3.516.756.427;
 - c. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp660.498.400 yang merupakan Pengembalian Belanja Pegawai Uang Lembur PNS;
 - d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp602.772.000;
 - a. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp558.785.608.

Penurunan dan tidak tercapainya realisasi Pendapatan PNBP Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024, diantaranya disebabkan oleh:

1. Menurunnya minat masyarakat dan sikap konsumen yang lebih konservatif dalam pengambilan keputusan pembelian, yang merupakan adaptasi terhadap dinamika perekonomian saat ini;
2. Keterbatasan *supply* baterai untuk produksi kendaraan subsidi; dan
3. Banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama.

B.3 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp6.339.489.007.922** atau **93,91** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp6.750.298.621.000**. Belanja Negara TA 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp617.029.675.104** atau 10,78 persen dibandingkan dengan TA 2023 sebesar **Rp5.722.459.332.818**. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	665.206.211.000	661.720.639.858	99	560.902.286.762	17,97
Belanja Barang	3.797.185.479.000	3.545.515.481.874	93	3.178.184.404.295	11,56
Belanja Modal	2.287.906.931.000	2.132.252.886.190	93	1.983.372.641.761	7,51
Jumlah	6.750.298.621.000	6.339.489.007.922	94	5.722.459.332.818	10,78

B.4 BELANJA PEGAWAI

*Belanja Pegawai
Rp661 Miliar*

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp661.720.639.858** dan **Rp560.902.286.762**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp100.818.353.096 atau 17,97 persen dibandingkan TA 2023 sebesar Rp560.902.286.762.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA PEGAWAI					
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	233.636.977.000	232.789.512.733	99,64	203.775.696.669	14,24
Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.553.000	3.746.862	12,26	3.465.671	8,11
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	14.426.585.000	14.395.336.828	99,78	13.554.545.841	6,20
Belanja Tunj. Anak PNS	4.199.644.000	4.140.939.474	98,60	3.932.921.267	5,29
Belanja Tunj. Struktural PNS	2.249.905.000	2.220.181.200	98,68	2.054.940.000	8,04
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.565.163.000	1.523.708.800	97,35	1.415.041.992	7,68
Belanja Tunj. PPh PNS	2.867.536.000	2.668.737.124	93,07	1.433.698.753	86,14
Belanja Tunj. Beras PNS	12.149.829.000	12.082.741.570	99,45	12.006.079.866	0,64
Belanja Uang Makan PNS	36.359.608.000	35.718.341.700	98,24	36.026.732.200	(0,86)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	417.715.000	417.695.000	100,00	313.345.000	33,30
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.021.721.000	11.891.333.332	98,92	11.311.577.284	5,13
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	319.925.236.000	317.852.274.623	99,35	285.828.044.543	11,20
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
Belanja Gaji Pokok PPPK	12.009.082.000	11.952.970.600	99,53	2.229.452.000	436,14
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	297.000	245.361	82,61	20.626	1.089,57
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	636.173.000	618.566.810	97,23	99.394.720	522,33
Belanja Tunjangan Anak PPPK	138.568.000	134.950.840	97,39	21.676.266	522,57
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.064.795.000	1.044.445.000	98,09	195.300.000	434,79
Belanja Tunjangan Beras PPPK	686.641.000	672.419.700	97,93	126.445.320	431,79
Belanja Uang Makan PPPK	2.379.158.000	2.320.435.000	97,53	552.825.000	319,74
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	3.900.000	3.900.000	100,00	1.300.000	200,00
Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	0	-	552.184.550	(100,00)
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 5116	16.918.614.000	16.747.933.311	98,99	3.226.413.932	419,09
Belanja Lembur					
Belanja Uang Lembur	14.388.013.000	13.843.661.250	96,22	14.721.138.700	(5,96)
Belanja Uang Lembur PPPK	176.259.000	142.216.000	80,69	5.902.000	2.309,62
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	14.564.272.000	13.985.877.250	96,03	14.721.138.700	(4,99)
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito					
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	298.488.292.000	297.979.024.923	99,83	254.408.558.448	17,13
Belanja Pegawai Transito	-	-	-	0	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	15.309.797.000	15.155.529.751	98,99	2.160.044.589	601,63
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	313.798.089.000	313.134.554.674	99,79	256.568.603.037	22,05
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	665.206.211.000	661.720.639.858	99,48	557.117.786.280	18,78

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kenaikan tunjangan kinerja akibat adanya *inpassing* jabatan fungsional serta kenaikan tunjangan kinerja karena penyesuaian *grading* pegawai.

B.5 BELANJA BARANG

Belanja
Barang
Rp3,545
triliun

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3.545.515.481.874** dan **Rp3.178.184.404.295**.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan **11,56** persen dari realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA BARANG					
Belanja Barang Operasional	920.015.110.000	874.980.424.874	95,11	803.696.573.292	8,87
Belanja Barang Non Operasional	1.657.779.752.000	1.510.340.067.387	91,11	1.376.210.052.356	9,75
Belanja Barang Persediaan	75.039.305.000	73.917.911.296	98,51	57.068.551.423	29,52
Belanja Jasa	192.693.321.000	189.893.399.246	98,55	171.931.111.957	10,45
Belanja Pemeliharaan	314.730.625.000	288.956.407.918	91,81	191.952.443.465	50,54
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	342.732.529.000	328.534.555.775	95,86	284.309.542.961	15,56
Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.932.115.000	4.136.467.558	83,87	4.405.223.330	(6,10)
Belanja Barang BLU	14.017.431.000	13.886.438.975	99,07	7.546.680.397	84,01
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	251.203.914.000	238.812.566.887	95,07	268.415.385.464	(11,03)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	24.041.377.000	22.057.241.958	91,75	12.648.839.650	74,38
Jumlah	3.797.185.479.000	3.545.515.481.874	93,37	3.178.184.404.295	11,56

Kenaikan belanja barang yang signifikan merupakan belanja barang BLU dan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.

B.6 BELANJA MODAL

Belanja
Modal
Rp2,132
triliun

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.132.252.886.190** dan **Rp1.983.372.641.761** Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan 7,51 persen dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023. Kenaikan Belanja Modal disebabkan adanya kenaikan Pagu Anggaran Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 dikarenakan

adanya penambahan Pembangunan infrastruktur pada sektor Transportasi seperti Pembangunan Terminal Tipe A, Pembangunan UPPKB dan Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang harus diselesaikan sebelum Tahun 2024.

Rincian Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Desember 2024		%	Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	15.467.352.000	15.235.901.520	98,50	355.214.975	4.189,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	832.088.172.000	729.166.877.880	87,63	816.337.834.921	(10,68)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.316.800.117.000	1.270.909.902.854	96,52	1.078.478.473.178	17,84
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	4.948.390.500	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	118.657.401.000	112.120.391.501	94,49	74.813.860.825	49,87
Belanja Modal-BLU	4.893.889.000	4.819.812.435	98,49	8.438.867.362	(42,89)
Jumlah	2.287.906.931.000	2.132.252.886.190	93,20	1.983.372.641.761	7,51

B.6.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp15,235 miliar

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp15.235.901.520** dan **Rp355.214.975**. Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 4.189,21 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Rincian Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL TANAH					
Belanja Modal Tanah	15.449.352.000	15.228.750.000	98,57	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	18.000.000	7.151.520	39,73	355.214.975	(97,99)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja	15.467.352.000	15.235.901.520	98,50	355.214.975	4.189,21

Belanja Modal Tanah terdapat pada satker Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1.854.800.000 berupa pengadaan tanah *dedicated lane* di Terminal Barang Internasional Motaain dan Balai Pengelola Transportasi Darat Maluku sebesar Rp13.373.950.000 berupa pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor. Sedangkan Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Tengah sebesar Rp7.151.520.

B.6.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
**Rp729
miliar**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp729.166.877.880** dan **Rp816.337.834.921**. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 10,68 persen dibandingkan 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	832.088.172.000	729.166.877.880	87,63	816.157.834.921	(10,66)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	180.000.000	(100,00)
Jumlah Belanja	832.088.172.000	729.166.877.880	87,63	816.337.834.921	(10,68)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang signifikan, diantaranya terdapat pada:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Maluku Utara sebesar Rp32.807.543.165 berupa pengadaan pemasangan dan supervisi perlengkapan jalan, pengadaan dan instalasi radio pelabuhan penyeberangan serta operasional pelabuhan penyeberangan;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Sulawesi Selatan sebesar Rp31.876.336.529 berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan prioritas nasional, penanganan lokasi rawan kecelakaan, pengembangan sistem layanan transportasi darat dan operasional pelabuhan penyeberangan;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Tengah sebesar Rp28.036.771.856 berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan prioritas nasional dan APJ, perbaikan lokasi rawan kecelakaan serta operasional terminal penumpang tipe A, pelabuhan dan UPPKB;
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur sebesar Rp25.361.342.000 berupa pembangunan dan operasional terminal penumpang tipe A, operasional pelabuhan penyeberangan, pembangunan sistem pemantauan lalu lintas kapal SDP, pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) serta pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan prioritas nasional;
5. Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Tengah sebesar Rp22.619.309.798 berupa operasional terminal penumpang Tipe A, UPPKB dan pelabuhan penyeberangan, pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), pengadaan alat kalibrasi uji berkala kendaraan

bermotor serta pengadaan pemasangan rambu lalu lintas dan deliniator.

B.6.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
**Rp1,270
triliun**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.270.909.902.854** dan **Rp1.078.478.473.178**. Belanja modal gedung dan bangunan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,84 persen dibandingkan 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.10 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.270.279.608.000	1.225.931.941.907	96,51	1.001.529.402.556	22,41
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	189.874.000	189.539.160	99,82	298.500.900	(36,50)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	46.330.635.000	44.788.421.787	96,67	76.650.569.722	(41,57)
Jumlah Belanja	1.316.800.117.000	1.270.909.902.854	96,52	1.078.478.473.178	17,84

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang signifikan diantaranya terdapat pada:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Sulawesi Selatan sebesar Rp98.246.100.257 berupa Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pasilambena, Takabonerate dan Pasimarannu;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Papua sebesar Rp62.934.515.843 berupa Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade Kab. Mappi Tahap III;

3. Balai Pengelola Transportasi Darat Papua Barat sebesar Rp60.560.366.544 berupa Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana Kab. Kaimana Tahap III;
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Timur sebesar Rp 57.398.598.023 berupa Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Kertonegoro Ngawi, Purboyo, Arjosari, Bayuangga, Tawang Alun dan Aryawiraraja;
5. Balai Pengelola Transportasi Darat Bangka Belitung sebesar Rp43.943.110.150 berupa Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru Bakit-Mantung (Tahap I).
6. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Maluku sebesar Rp99.873.360 berupa Penyusunan DED Gedung Kantor dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kalimantan Tengah sebesar Rp89.665.800 berupa Supervisi Renovasi UPPKB Anjir Serapat.

B.6.4 Belanja Modal Lainnya

*Belanja
Modal
Lainnya
Rp112
Miliar*

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp112.120.391.501** dan **Rp74.813.860.825**. Belanja modal lainnya digunakan untuk memperoleh Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **49,87** persen dibandingkan 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL LAINNYA					
Belanja Modal Lainnya	118.657.401.000	112.120.391.501	94,49	74.813.860.825	49,87
Jumlah	118.657.401.000	112.120.391.501	94,49	74.813.860.825	49,87

Belanja Modal Lainnya yang signifikan diantaranya terdapat pada:

- a. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp49.513.310.264 berupa pembangunan sistem angkutan umum massal dan penyusunan dokumen DED layanan angkutan umum massal perkotaan tahap 2 di KIPP IKN;
- b. Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp12.149.235.270 berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis bidang sarana dan prasarana;
- c. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp11.351.759.377 berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis bidang prasarana TSDP contohnya penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) dan penyusunan RIP dan DLKp/DLKr pelabuhan penyeberangan;
- d. Balai Pengelola Transportasi Darat Bali sebesar Rp11.026.500.000 berupa pengadaan dan pemasangan perangkat *Local Port Service* (LPS) di pelabuhan penyeberangan Padang Bai - Lembar;
- e. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp9.831.555.600 berupa penyusunan DED dan FS terminal penumpang tipe A, Penyusunan masterplan dan DED fasilitas penimbangan, reviu DED fasilitas pendukung integrasi antar moda serta penyusunan *Basics Engineering Design* (BED) fasilitas pendukung dan integrasi moda transportasi publik di KIPP IKN.

*Belanja
Modal BLU
Rp4,81
miliar*

B.6.5 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp4.819.812.435** dan **Rp8.438.867.362**.

Belanja Modal BLU merupakan Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian asset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Belanja Modal BLU terdapat pada satker BLU BPLJSKB dengan rincian:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU sebesar Rp2.069.586.808 berupa pengadaan peralatan penunjang pengujian *passenger car* dan sepeda motor, pengadaan *density meter* dan pengadaan peralatan penunjang pengujian;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU sebesar Rp199.850.000 berupa peningkatan fasilitas area penerimaan tamu;
- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLU sebesar Rp2.351.685.627 berupa review DED, pelaksanaan dan supervisi revitalisasi sistem kelistrikan BPLJSKB;
- d. Belanja Modal Lainnya – BLU sebesar Rp198.690.000 berupa pengadaan Lisence Euro 2 Uji Emisi R40.

C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

Saldo Aset per 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp19.810.627.590.995 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.634.522.918.827; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15.419.280.150.319; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.756.824.521.849.

Sedangkan saldo Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.349.269.288.185 dan Rp18.461.358.302.810.

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp744,8 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp744.819.613** dan **Rp146.455.531**.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN				
BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	-	3.087.500	(3.087.500)	(100,00)
BPTD Kelas II Sulawesi Utara	-	74.698.531	(74.698.531)	(100,00)
BPTD Kelas II Maluku	-	2.125.500	(2.125.500)	(100,00)
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	744.819.613	66.544.000	678.275.613	1.019,29
Jumlah	744.819.613	146.455.531	598.364.082	408,56

Terhadap saldo kas tersebut, satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	NTPN	Tanggal Penyetoran	Nilai
1.	702501022077079	CEFA8522CJTS144N	01 Januari 2025	Rp700.000.000
2.	702501022077598	D6CFD0JUTF1U04KU	01 Januari 2025	Rp40.000.000
3.	702501022077605	D7FD07NAS3L184L5	01 Januari 2025	Rp4.000.000

No	Kode Billing	NTPN	Tanggal Penyetoran	Nilai
4.	702501022077609	68E222CPT46MQ4L9	01 Januari 2025	Rp819.613
Total				Rp744.819.613

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan
Rp16,03 juta

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp16.034.950** dan **Rp53.053.000**. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan dan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan layanan yang sudah diterima bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN				
Direktorat Angkutan Jalan	4.938.800	53.053.000	(48.114.200)	(90,69)
BPTD Kelas II Kalimantan Timur	11.096.150	-	11.096.150	0
Jumlah	16.034.950	53.053.000	(37.018.050)	(69,78)

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp4.938.800 yang merupakan Pendapatan Jasa Layanan *Buy The Service* (BTS) yang terdapat pada rekening Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan baru disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek	Nomor Surat Ijin	Tanggal Surat Ijin	Tgl Transaksi Terakhir	Saldo
1801004001300	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	BRI KC Tanah Abang	10	S-002911/KPN.1204/2	12-10-2022	31-12-2024	0
1506462136	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	BNI KC Harmoni/KCP Abdul Muis	10	S-002912/KPN.1204/2	12-10-2022	31-12-2024	4.938.800
18832000001	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	Thamrin Residence	10	S-3861/KPN.1204/202	12-10-2022	-	0
1210010634271	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	MandirinKCP Jakarta Kemenhub	10	S-002914/KPN.1204/2	12-10-2022	31-12-2024	0
6550586868	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	BCA KCP Abdul Muis	10	S-002913/KPN.1204/2	12-10-2022	31-12-2024	0

Atas sisa saldo kas tersebut, satker Direktorat Angkutan Jalan telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp4.938.800 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	NTPN	Tanggal Setor	Total
1.	820250102359357	F0FB23CIFT54RP9T	2 Januari 2025	Rp696.000
2.	820250102359205	776F60NA0DDVVP55	2 Januari 2025	Rp4.242.800
Total				Rp4.938.800

Selanjutnya, saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BPTD Kelas II Kalimantan Timur sebesar Rp11.096.150 merupakan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kariangau yang masih terdapat pada rekening Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024. Terhadap saldo kas tersebut, telah disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima pada bulan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	NTPN	Tanggal Setor	Total
1.	820250109209143	91DE961QVCSGJQHN	14 Januari 2025	Rp1.525.400
2.	820250109207610	57A8A61QVCSGJP1Q	14 Januari 2025	Rp9.570.750
Total				Rp11.096.150

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp119,27 juta

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp119.279.552** dan **Rp657.932.501** atau mengalami penurunan sebesar Rp538.652.949 atau 81,87 persen.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa bunga jasa giro, pungutan pajak belum disetor, serta belanja yang sudah dicairkan namun belum disetorkan ke pihak ketiga.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada BPTD Kelas II Sulawesi Utara yang merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Negara.

Untuk Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada BPTD Kelas II Kalimantan Timur merupakan Pungutan Tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau yang menjadi hak pihak ketiga (operator Kapal), yang masih terdapat pada Renening Penerimaan Lainnya dan belum ditransfer sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN				
BPTD Kelas II Sumatera Barat	-	318.863	(318.863)	(100,00)
BPTD Kelas II Sulawesi Utara	35.493.552	-	35.493.552	0
BPTD Kelas III Bangka Belitung	-	166.757	(166.757)	(100,00)
Direktorat Angkutan Jalan	-	84.269.733	(84.269.733)	(100,00)
KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN				
BPTD Kelas II Kalimantan Timur	83.786.000	573.177.148	(489.391.148)	(85,38)
Jumlah	119.279.552	657.932.501	(538.652.949)	(81,87)

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran pada BPTD Kelas II Sulawesi Utara telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun Pajak	Jenis Setoran	Nominal (Rp.)	Tanggal Setor	NTP/NTB	NTPN
411128	409	1.826.275	1/13/2025	980916787380	D6D9B5BBSK25UL79
411211	910	5.739.721	1/13/2025	230168952070	C42180T8DF67EPJ7
411122	910	2.399.203	1/13/2025	488561893410	7C9562M3D48KPN9Q
411211	910	17.594.153	1/13/2025	863721252599	6175F4EUCPDDH87S
411124	104	2.819.600	1/17/2025	940187175336	EC2215BB5KCQDQLC
411124	104	169.600	1/17/2025	940189175348	B69DF5BBSKCFQ3C
411124	104	2.660.000	1/17/2025	940180175305	74FE85BBSKCPU5LC
411124	104	160.000	1/17/2025	940183175320	8DDFA2M3D4LL39BK
411124	104	1.820.000	1/17/2025	940191175407	1151B00QTKUH84NU
411121	100	305.000	1/17/2025	940193175418	F4CE90T8DFH20GAE

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada BPTD Kelas II Kalimantan Timur telah ditransfer kepada pihak ketiga melalui bank dengan rincian sebagai berikut:

No	No Bukti	Nilai	Tanggal Setor	Penerima	Keterangan
1	14977 1497750 1497702 47 12	Rp22.200.000	31/01/2025	Mitra Transaksi Indonesia	Biaya Layanan E-Tiket Desember 2024
2	14977 1497750 1497702 43 13	Rp.61.586.000	10/02/2025	PT. Nurfatis Jaya Perkasa	Pembayaran Tenaga Petugas Loker Desember 2024
Total		Rp83.786.000			

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada
BLU
**Rp8,85
miliar**

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp8.859.114.365** dan **Rp9.938.505.875**.

Kas pada BLU merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan pada satker Badan Layanan Umum. Saldo Kas pada BLU mencakup deposito berjangka, dengan waktu kurang dari 3 bulan. Kas pada BLU terdapat pada satuan kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS PADA BLU				
Kas dan Bank - BLU	8.859.114.365	4.938.505.875	3.920.608.490	79,39
Setara kas Lainnya - BLU	0	5.000.000.000	(5.000.000.000)	(100,00)
Jumlah	8.859.114.365	9.938.505.875	(1.079.391.510)	(10,86)

Kenaikan saldo Kas dan Bank BLU berasal reklasifikasi akun dari Setara kas Lainnya BLU yang berasal dari transaksi pencairan Deposito berjangka pada BLU Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Saldo kas dan Bank BLU mengalami kenaikan sebesar Rp3.920.608.490 atau 79,39 persen dibandingkan dengan saldo *Audited* 2023.

C.5 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka (prepaid)
Rp37,32 juta

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp37.323.750** dan **Rp111.971.250**.

Belanja Dibayar dimuka merupakan pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

Belanja Dibayar dimuka terdapat pada satuan kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang merupakan Belanja Dibayar dimuka terkait Perpanjangan Lisensi Keamanan Jaringan Internet yang kadaluarsa pada tanggal 26 September 2025.

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp13,208 juta

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp13.208.500** dan **Rp319.329.600**.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pengakuan atas pendapatan layanan angkutan perkotaan dengan skema *Buy The Service* (BTS) bulan Desember 2024 yang baru akan diterima pada Januari 2025.

C.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp8,098 miliar

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp8.098.018.599** dan **Rp6.523.825.000**. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp22.072.592 berasal dari nilai bruto sebesar **Rp8.098.018.599** dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp8.075.946.007.

Saldo Piutang Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp1.574.193.599 atau 24,13 persen dibandingkan dengan saldo *Audited*

2023. Kenaikan signifikan terdapat pada Satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp1.552.010.089 yang merupakan pengakuan denda keterlambatan pembangunan 1 unit kapal penyeberangan Ro-Ro 500 GT (KMP Oputa Yi Koo) yang merupakan temuan BPK Tahun 2020-2022.

Tabel 3.5 Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
PIUTANG PNBP				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	6.442.165.000	6.442.165.000	0	0
Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan	1.633.670.089	81.660.000	1.552.010.089	1.900,58
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	22.183.510	0	22.183.510	0
Jumlah	8.098.018.599	6.523.825.000	1.574.193.599	24,13

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdapat pada 3 (tiga) satuan kerja, yaitu:

1. Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp6.442.165.000, merupakan Piutang Potensi Kekurangan PNBP atas SRUT,
2. Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan sebesar Rp1.633.670.089, merupakan:
 - a. Denda tidak terlaksananya pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis PD Panca Karya senilai Rp81.660.000;
 - b. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GT Tanjung Phising-Bombana senilai Rp1.552.010.089; dan
3. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Bermotor sebesar Rp22.183.510, merupakan pembagian keuntungan hasil perjanjian kerja sama optimalisasi pemanfaatan aset melalui pelayanan bengkel konversi kendaraan listrik antara BPLJSKB Bekasi dengan Poltrada Bali.

Nilai Piutang Bukan Pajak yang signifikan berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan atas Potensi Kekurangan PNBP atas Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tahun 2017 senilai

Rp683.751.900.000,00, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK RI atas Pelayanan Pengujian Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Lainnya Tahun 2016 dan 2017 Nomor 82/HP/XIV/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah mengajukan reviu kepada Se Inspektorat Jenderal terhadap Piutang PNBP atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Reviu kesatu dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp442.111.650.000 (empat ratus empat puluh dua miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada koreksi *Audited* LK Tahun 2020;
2. Reviu kedua dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp206.270.400.000 (dua ratus enam miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada LK Triwulan III Tahun 2021;
3. Reviu ketiga nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp32.902.750.000 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari nilai Rp32.902.750.000,00 yang telah disetujui oleh Inspektorat sesuai Surat Inspektur Jenderal Nomor KU.102/1/1/ITJEN/2022 tanggal 05 Januari 2022, telah penyesuaian/koreksi nilai Piutang PNBP senilai Rp26.460.585.000,00 dalam jurnal koreksi Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited*, dan sisanya tidak diakui oleh Tim Pemeriksa BPK;
4. Reviu keempat dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp2.567.132.383 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta serratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dan telah disesuaikan pada LK Tahun 2022 *Audited*.

Rincian Piutang PNBP dan tindak lanjut penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rincian Penyelesaian Piutang Bukan Pajak SRUT

No	Nama APM	Nilai Temuan SRUT (LHP Kinerja BPK RI)	Penyesuaian Nilai Piutang PNBP pada Laporan Keuangan			Piutang PNBP	Penyesuaian	Sisa Piutang PNBP
			Reviu Pertama	Reviu Kedua	Reviu Ketiga	01 Januari 2022	Reviu Keempat	31 Desember 2022
a	b	c	d	e	f	g = c-d-e-f	h	i = g-h
1	PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	0
2	PT. Tjahja Sakti Motor (BMW, MINI, Peugeot)	1.692.000.000	1.691.000.000	1.000.000	0	0	0	0
3	PT. TVS Motor Company Indonesia	117.600.000	115.800.000	1.800.000	0	0	0	0
4	PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	130.551.100.000	119.050.500.000	11.500.600.000	0	0	0	0
5	PT. Astra Honda Motor	434.660.200.000	239.476.200.000	176.510.800.000	18.673.200.000	0	0	0
6	PT. Garuda Mataram Motor (VW dan Audi)	286.000.000	144.500.000	1.000.000	96.500.000	44.000.000	44.000.000	0
7	PT. Tata Motor Indonesia	347.750.000	81.500.000	0	0	266.250.000	0	266.250.000
8	PT. Hyundai Indonesia Motor	484.000.000	330.500.000	11.750.000	0	141.750.000	0	141.750.000
9	PT. Astra Daihatsu Motor	9.994.750.000	5.988.000.000	2.208.250.000	0	1.798.500.000	0	1.798.500.000
10	PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia	15.001.250.000	14.423.500.000	0	0	577.750.000	0	577.750.000
11	PT. Kawasaki Motor Indonesia	3.922.900.000	964.300.000	508.100.000	2.368.300.000	82.200.000	0	82.200.000
12	PT Suzuki Indomobil Motor	31.360.100.000	21.201.600.000	7.234.850.000	700.000	2.922.950.000	2.167.600.000	755.350.000
13	PT. Toyota - Astra Motor	50.061.500.000	37.234.250.000	6.618.250.000	3.711.750.000	2.497.250.000	0	2.497.250.000
14	PT. Eurokars Motor Indonesia (Mazda)	600.750.000	600.750.000	0	0	0	0	0
15	PT. Honda Prospect Motor (Honda Mobil)	3.043.000.000	314.500.000	1.674.000.000	1.049.385.000	5.115.000	0	5.115.000
16	PT. Hino Motor Sales Indonesia	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0	0
17	PT. Nissan Motor Distributor Indonesia	860.750.000	300.000.000	0	560.750.000	0	0	0
18	PT. Kia Indonesia Motor	318.000.000	0	0	0	318.000.000	0	318.000.000
19	PT. Auto Euro Indonesia (Renault)	255.500.000	0	0	0	255.500.000	255.500.000	0
Jumlah		683.751.900.000	442.111.650.000	206.270.400.000	26.460.585.000	8.909.265.000	2.467.100.000	6.442.165.000

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Bukan
Pajak
**Rp8,075
miliar**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp8.075.946.007** dan **Rp6.523.825.000**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai piutang yang disajikan dalam Aset Lancar.

Tabel 3.7 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Uraian	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	8.098.018.599	6.523.825.000	1.574.193.599	24
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(8.075.946.007)	(6.523.825.000)	(1.552.121.007)	23,79
Piutang Bukan Pajak (Netto)	22.072.592	-	22.072.592	0

Tabel 3.8 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak

Uraian	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	Piutang Bukan Pajak (Netto)
1	2	3	4	5
Lancar	22.183.510	0,5%	(110.918)	22.072.592
Kurang Lancar	0	10%	0	0
Diragukan	0	50%	0	0
Macet	8.075.835.089	100%	(8.075.835.089)	0
Jumlah	8.098.018.599		(8.075.946.007)	22.072.592

Piutang Bukan Pajak yang dikategorikan sebagai Piutang Bukan Pajak dengan kualitas Macet dan disisihkan seluruhnya (100%), terdapat pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan Piutang PNPB dengan wajib bayar PT. KIA Indonesia Motor yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Majelis Nomor 169/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

C.9 Persediaan

Persediaan
Rp2,624
triliun

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.624.711.065.505** dan **Rp3.210.746.968.136**.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, dan Persediaan Lainnya) dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Pemerintah Daerah/Masyarakat.

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
Barang Konsumsi	42.060.902.308	22.021.945.818	20.038.956.490	0,91
Bahan untuk Pemeliharaan	223.891.596	147.501.467	76.390.129	0,52
Suku Cadang	63.038.970	48.884.908	14.154.062	0,29
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.118.265.163.099	1.408.862.925.304	(290.597.762.205)	(0,21)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	863.548.824.060	1.143.768.254.754	(280.219.430.694)	(0,24)
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	580.233.952.523	605.987.636.217	(25.753.683.694)	(0,04)
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	7.424.315.000	7.424.315.000	-	0
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	943.492.000	(943.492.000)	(1,00)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	4.520.974.496	18.013.445.476	(13.492.470.980)	(0,75)
Bahan Baku	2.051.057.803	1.961.970.403	89.087.400	0,05
Persediaan Lainnya	6.318.945.650	1.566.596.789	4.752.348.861	3,03
Jumlah	2.624.711.065.505	3.210.746.968.136	(586.035.902.631)	(18,25)

Per 31 Desember 2024, Persediaan yang dalam kondisi Rusak sebesar Rp10.929.600 merupakan blangko SUT Tahun 2021 dan Rp0,00 (tidak ada) dalam kondisi Usang.

Saldo Persediaan Barang Konsumsi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.060.902.308 dan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp20.038.956.490. saldo Persediaan Barang Konsumsi paling signifikan sebesar Rp35.116.153.173 merupakan barang cetakan, salah satunya pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp25.191.012.000 berupa barang cetakan kartu Blue yang berada di Gudang Jatiwaringin.

Saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat bersifat signifikan disebabkan oleh proses pemindahtanganan (hibah) kepada Pemerintah Daerah/ Masyarakat, masih dalam proses pengumpulan data dukung pemindahtanganan atau telah diusulkan persetujuan pemindahtanganan, namun sampai dengan proses penyusunan Laporan Keuangan belum terbit surat persetujuan pemindahtanganan.

Nilai saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp2.573.993.229.178 terdiri dari Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.118.265.163.099, Peralatan dan Mesin sebesar Rp863.548.824.060, Jalan irigasi dan Jaringan sebesar Rp580.233.952.523, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.424.315.000, dan Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp4.520.974.496.

Dari Persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam jenis Aset antara lain sebagai berikut:

1. Dermaga Penyeberangan sebesar Rp1.673.667.335.848 dimana sebesar Rp303.894.669.528 masih dalam proses inventarisasi, dan sebesar Rp1.369.772.666.320 telah dilakukan inventarisasi;
2. Bus sebesar Rp460.515.772.646 dimana sebesar Rp110.434.836.299 telah dilakukan inventarisasi dan Rp350.080.936.347 dalam proses inventarisasi
3. Kapal sebesar Rp22.247.767.050 yang telah dilakukan inventarisasi;
4. ATCS sebesar Rp55.825.450.847 dimana sebesar Rp 25.730.307.000 telah dilakukan inventarisasi, dan sebesar Rp30.095.143.847 dalam proses inventarisasi;
5. Rambu Jalan sebesar Rp304.334.334.642 dimana sebesar Rp 91.781.763.795 telah dilakukan inventarisasi, dan sebesar Rp212.552.570.847 dalam proses inventarisasi;
6. Rambu SDP sebesar Rp21.668.169.050 dimana sebesar Rp 13.179.261.300 telah dilakukan inventarisasi dan sebesar Rp8.488.907.750 dalam proses inventarisasi;
7. Barang Lainnya sebesar Rp35.734.399.095 dimana sebesar Rp13.999.160.649 telah dilakukan inventarisasi dan sebesar Rp21.735.238.446 belum dilakukan inventarisasi.

Rincian Persediaan dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.10 Tanah

Tanah
Rp2,51
triliun

Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.514.097.267.663** dan **Rp2.523.030.687.695**. Aset Tanah mengalami penurunan sebesar Rp8.933.420.032 atau 0,35 persen. Nilai Aset Tanah yang signifikan terdapat pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.222.967.797.000, Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Tengah sebesar Rp299.330.361.517 dan BPTD Kelas II Jawa Timur sebesar Rp338.708.376.944.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Tanah
A	B	C
000	Saldo Awal TAYL	2.523.030.687.695
100	Saldo Awal	48.544.605.285
101	Pembelian	17.515.087.720
102	Transfer Masuk	123.269.490.919
103	Hibah Masuk	16.875.276.182
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	407.200.000
167	Reklasifikasi Dari Aset Konsesi Jasa ke Aset Tetap	5.524.620.000
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m ²)	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	146.579.240
208	Pengembangan Melalui KDP	1.447.600.000
214	Koreksi Susulan	332.200.000
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(48.544.605.285)
301	Penghapusan	(36.163.689.263)
302	Transfer Keluar	(119.287.010.919)
303	Hibah Keluar	(14.388.008.471)
305	Koreksi Pencatatan	(4.612.765.440)
921	Internal Transfer Keluar	(14.233.253.700)
922	Internal Transfer Masuk	14.233.253.700
Jumlah		2.514.097.267.663

1. Koreksi Sawal sebesar Rp48.544.605.285 dengan nilai signifikan sebesar Rp48.164.758.438 terdapat pada satker BPLJSKB Bekasi merupakan tindak lanjut koreksi pencatatan bidang tanah BPLJSKB yang terdampak pengadaan tanah tol Cimanggis-Cibitung sesuai dengan surat Penyampaian Penghapusan Laporan BMN pada BPLJSKB Nomor PL.201/1/7/BPLJSKB/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan sebesar Rp379.846.847 pada BPTD Kelas II Jateng merupakan perbaikan saldo awal sebagai tindak lanjut koreksi pencatatan atas Terminal Tipe A Kebumen (pemecahan sertifikat)

2. Pembelian sebesar Rp17.515.087.720 terdapat pada BPTD Kelas II Maluku sebesar Rp13.373.950.000 merupakan pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor, BPTD Kelas II Maluku Utara sebesar Rp4.133.986.200 yang merupakan Pengadaan Tanah Lahan untuk Gedung Pelayanan BPTD dan Gedung Kantor, dan sebesar Rp7.151.520 pada BPTD Kelas II Jawa Tengah merupakan biaya pengukuran dan pemetaan bidang sertifikatt Terminal Mangkang
3. Transfer Masuk sebesar Rp123.269.490.919 diantaranya merupakan transaksi transfer tanah P3D yang berasal dari satker Setditjen Darat, transfer tanah Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi yang mengalami reorganisasi dari BPTD Kelas II Jawa Tengah, dan pada BPTD Kelas III Kepulauan Riau yang berasal dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Hibah Masuk sebesar Rp16.875.276.182.000 pada Setditjen Perhubungan Darat merupakan hibah masuk Terminal Tipe A Kota Solok dan Tanah Pelabuhan Bakit;
5. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp407.200.000 terdapat pada BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur merupakan transaksi perolehan tanah *dedicated lane* TBI Motain sebanyak 3 bidang tanah.
6. Reklasifikasi Aset Konsesi Jasa menjadi Aset Tetap sebesar Rp5.524.620.000 pada satker KSOPP Danau Toba berupa Tanah Pelabuhan Ajibata yang akan dilakukan perbaikan pencatatan sesuai dengan hasil reuiu Inspektorat Jenderal
7. Transfer Keluar sebesar Rp17.558.447.446 yang merupakan transaksi serah terima aset Hibah masuk dari Satker Pengirim Setditjen Hubdat kepada satker Penerima BPTD Kelas II Riau dan BPTD Kelas III Yogyakarta;
8. Hibah Keluar sebesar Rp14.388.008.471 yang merupakan hibah keluar asset pada BPTD Kelas III Yogyakarta berupa Terminal Tipe Giwangan (lama) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
9. Penghapusan sebesar Rp36.163.689.263 dengan nilai sebesar Rp 35.867.789.263 pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan penghapusan bidang tanah

BPLJSKB yang terdampak pengadaan tanah tol Cimanggis-Cibitung dan sebesar Rp295.900.000 pada BPTD Kelas II Bali berupa hibah tanah Tanah Lapangan Parkir Lainnya kepada Pemkab Bedugul yang salah menggunakan menu penghapusan.

Rincian Tanah per 31 Desember 2024 dan Rincian Mutasi Tanah per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.11 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp9,15
triliun

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp9.157.630.701.501** dan **Rp8.748.276.279.951**. dan mengalami kenaikan sebesar Rp409.354.421.550 atau 4,68 persen.

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang paling signifikan terdapat pada Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp1.627.512.367.720.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
A	B	C
000	Saldo Awal TAYL	8.748.276.279.951
100	Saldo Awal	220.947.443.588
101	Pembelian	163.330.339.172
102	Transfer Masuk	135.936.668.701
103	Hibah Masuk	333.896.360
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	514.614.709.040
106	Pembatalan Penghapusan	31.980.000.000
107	Reklasifikasi Masuk	2.980.030.436
112	Perolehan Lainnya	163.361.272.482
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	97.000.000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	19.226.628.855
167	Reklasifikasi Dari Aset Konsesi Jasa ke Aset Tetap	1.094.295.965
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	500.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	226.159.392
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	6.401.200.835
208	Pengembangan Melalui KDP	14.335.537.000
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(13.411.026.430)
301	Penghapusan	(9.207.465.474)
302	Transfer Keluar	(147.426.747.608)
303	Hibah Keluar	(25.881.483.732)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.841.851.555)
305	Koreksi Pencatatan	(396.173.843.347)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(15.906.664.062)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	0

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
A	B	C
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(195.144.614.288)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	13.682.774.200
441	Perubahan BMN Ke BMN Dalam Proses PMPP	(73.378.636.000)
921	Internal Transfer Keluar	(85.790.962.005)
922	Internal Transfer Masuk	85.790.962.005
Jumlah		9.157.630.701.501

Mutasi Aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp220.947.443.588 merupakan transaksi pemecahan dan perbaikan pencatatan aset untuk aset perolehan TAYL sebagai tindak lanjut dari koreksi pencatatan atau koreksi pencatatan nilai berkurang. nilai signifikan terdapat pada Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat, Direktorat Prasarana Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan, BPTD Kelas II Sumbar, BPTD Kelas II NTT, dan BPTD Kelas II Sulsel;
2. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah diantaranya sebesar Rp4.768.500 pada satker BPLJSKB Bekasi merupakan transaksi pengakuan pembelian router yang sebelumnya diakui sebagai beban pemeliharaan BLU, sebesar Rp423.981.659 pada BPTD Kelas II Sultra merupakan transaksi penyesuaian pencatatan UPPKB Sambilambo sesuai dengan RAB Kontrak;
3. Pembelian sebesar Rp163.330.339.172 terdapat seluruh satker di lingkungan Ditjen Darat yang merupakan transaksi pengadaan Alat Perkantoran, Alat Traffic dan Monitoring dan perlengkapan jalan;
4. Transfer Masuk sebesar Rp135.936.668.701 diantaranya merupakan transaksi antar aset antar satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat karena adanya reorganisasi Balai;
5. Hibah Masuk sebesar Rp333.896.360 terdapat pada Setditjen Perhubungan Darat yang berasal dari PT. Surga Pelangi berupa Alat Penerangan Jalan dan Rambu Jalan lainnya;
6. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp514.614.709.040 merupakan pendefinifan pekerjaan perlengkapan jalan di ruas Jalan nasional;

7. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan, diantaranya sebesar Rp3.860.844.500 pada Direktorat Angkutan Jalan merupakan micro bus yang akan diusulkan proses PMPP, sebesar Rp6.484.059.625 pada Direktorat TSDP merupakan perbaikan pencatatan 4 (empat) kapal passanger sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Nomor 26/LHA/IT.I/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024; pada BPTD Kelas II Maluku sebesar Rp 2.495.313.200 berupa perbaikan pencatatan pengadaan Zona Selamat Sekolah (Zoss);
8. Reklasifikasi Aset dari Aset Konsesi Jasa menjadi Aset Tetap pada BPLJSKB Bekasi dan Kantor KSOPP Danau Toba;
9. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp14.335.537.000 pada BPTD Kelas II Papua dan BPTD Kelas III Bengkulu yang merupakan transaksi pengadaan faskes;
10. Penggunaan Kembali BMN sebesar Rp13.682.774.200 terdapat pada BPTD Kelas II Lampung Berupa ATC dan Kapal Passenger yang merupakan hasil inventarisasi BMN yang akan dialihkan kepada Ditjen Perhubungan Laut;
11. Transfer Keluar sebesar Rp147.426.747.608 merupakan transfer keluar antar satker di lingkungan Ditjen Hubdat dan transaksi alih status kepada unit kerja lain di luar Kementerian Perhubungan. Transaksi Alih Status diantaranya meliputi transfer bus bantuan dari satker Direktorat Angkutan Jalan kepada Kementerian Agama (IAIN Palopo, UIN Sunan Kalijaga, UIN Antasari Banjarmasin, dan IAIN Manado, UIN Datokarama Palu, IAIN Curug, Madrasah Aliyah, dan IAIN Kala Langsa), Komisi Yudisial, Universitas Cendrawasih dan Politeknik Ambon;
12. Perubahan BMN ke BMN dalam proses PMPP sebesar Rp73.378.636.000 yang terdapat pada satker Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp16.225.500.000 berupa reklasifikasi 23 Bus ke Perum Damri, BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebesar Rp25.583.928.000 merupakan reklasifikasi Aset Tetap ke BMN dalam proses PMPP untuk KMP Puteri Leanpuri ke PT ASDP Indonesia Ferry dan KSOPP Danau Toba sebesar Rp31.569.208.000

merupakan reklasifikasi Aset Tetap ke BMN dalam Proses PMPP untuk KMP Kaldera Toba ke PT ASDP Indonesia Ferry;

13. Hibah Keluar sebesar Rp25.881.483.732 dengan nilai sebesar Rp-14.003.097.500 terdapat pada BPTD Kelas II Kalteng berupa Hibah Dermaga Kota Waringin Barat, sebesar Rp2.249.600.702 terdapat pada BPTD Kelas II NTT berupa Hibah Rambu bersuar lainnya Pelabuhan Waingapu yang diserahkan kepada Pemkab Sumba Timur dan Traffic Light yang diserahkan pada Pemkab Manggarai Barat, sebesar Rp4.734.710.000 pada BPTD Kelas II Sulut berupa ATCS Kota Bitung yang diserahkan kepada Pemkot Bitung, sebesar Rp2.592.502.530 pada BPTD Kelas II Kalsel berupa ATCS Kota Banjarmasin yang diserahkan kepada Pemkot Banjarmasin,
14. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp39.864.056.250 pada Direktorat TSDP merupakan penghentian PM Sepeda Motor karena Tindak Lanjut LHA Itjen dan Penghentian kapal passenger dan kapal angkut serbaguna, sebesar Rp56.061.533.735 pada BPLJSKB Bekasi merupakan peralatan mesin yang direklas kedalam Aset lain lain untuk proses penghapusan BMN, sebesar Rp1.498.058.100 pada BPTD Kelas II Sulut berupa penghentian alat angkutan apung bermotor, sebesar Rp770.885.225 pada BPTD Kelas II Bali berupa Alat perkantoran, BPTD Kelas II NTT sebesar Rp77.739.372.216 merupakan penghentian aset pada Pelabuhan Rajiua sesuai dengan reviu Tim Inspektorat Jenderal;

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilakukan penyesuaian pencatatan terhadap aset Perlengkapan Jalan per unit sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cara melakukan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk.

Marka Jalan, Paku Jalan, Patok Lalin, dan Pita Penggaduh dilakukan koreksi pencatatan untuk dibebankan sebagai Beban Barang dan selanjutnya dianggarkan menggunakan Belanja Non Operasional

Lainnya sesuai dengan SE Bagan Akun Nomor SE-DRJD Nomor 7 Tahun 2021.

C.12 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp6,75 triliun

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp6.759.595.073.288** dan **Rp5.937.512.411.387**. Terjadi Peningkatan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp822.082.661.901 atau 12,01 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Nilai Aset Gedung dan Bangunan paling signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Tengah sebesar Rp787.517.894.181 dan Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Timur sebesar Rp764.477.958.939.

Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
A	B	C
000	Saldo Awal TAYL	5.937.512.411.387
100	Saldo Awal	184.339.967.609
101	Pembelian	4.134.293.720
102	Transfer Masuk	332.814.732.870
103	Hibah Masuk	7.997.567.363
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	925.620.944.486,00
107	Reklasifikasi Masuk	36.727.379.089
112	Perolehan Lainnya	136.894.720.983,00
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	37.298.066.417
167	Reklasifikasi Dari Aset Konsesi Jasa ke Aset Tetap	45.181.854.430
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	199.850.000
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	90.036.446.714
208	Pengembangan Melalui KDP	89.223.295.468
209	Koreksi Manual	(7.539.012.200)
214	Koreksi Susulan	72.797.556.846
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(17.760.797.100,00)
301	Penghapusan	(27.117.209.000)
302	Transfer Keluar	(334.203.618.600)
303	Hibah Keluar	(130.884.102.881)
304	Reklasifikasi Keluar	(32.527.811.406)
305	Koreksi Pencatatan	(533.722.335.684,00)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(42.935.421.936)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(55.710.867.000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	41.217.161.713
921	Internal Transfer Keluar	(580.808.772.785)
922	Internal Transfer Masuk	580.808.772.785

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
A	B	C
	Jumlah	6.759.595.073.288

1. Koreksi Sawal dengan nilai sebesar Rp184.339.967.609 dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Sumut sebesar Rp17.493.716.176, berupa perbaikan pencatatan Dermaga Onan Rungu dan Sipingga, BPTD Kelas II Jatim sebesar Rp26.200.035.593 perbaikan pencatatan Terminal Tamanan Kediri, sebesar Rp61.428.936.403 pada BPTD Kelas II Kalsel pemecahan bangunan Gedung kantor, sebesar Rp17.671.804.350 pada BPTD Kelas II Sultra merupakan perbaikan pencatatan dermaga Lasusua sebesar Rp17.220.498.708 pada KSOPP Danau Toba, dan sebesar Rp37.081.825.103 pada BPTD Kelas II NTT atas Pekerjaan Pembangunan Terminal ALBN Kefamenanu (Tahun 2011 s.d. 2015)
2. Transfer Masuk sebesar Rp332.814.732.870, dengan rincian:
 - a. Nilai sebesar Rp221.867.462.105 pada Kantor Terminal Tirtonadi yang berasal dari BPTD Kelas II Jateng akibat adanya reorganisasi,
 - b. nilai sebesar Rp30.694.176.570 pada BPTD Kelas III Yogyakarta berupa TTA Giwangan yang berasal dari Setditjen Hubdat,
 - c. nilai sebesar Rp31.248.327.195 pada BPLJSKB Bekasi yang berasal dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan berupa Gedung Faspel Pengujian Kendaraan Bermotor,
 - d. sebesar Rp198.240.000 pada BPTD Kelas III Bengkulu berupa Bangunan Gedung Terminal Tipe A Air Sebakul yang berasal dari Satker BPTD Kelas II Lampung, dan
 - e. sebesar Rp32.564.640.000 pada BPTD Kelas III sulbar berupa Gedung Bangunan Terminal Simbuang Mamuju yang berasal dari BPTD Kelas II Sulsel.
3. Hibah Masuk sebesar Rp7.997.567.363 pada Setditjen Perhubungan Darat diantaranya berasal dari Terminal Tipe A Bareh Solok Kota Solok.

4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp925.620.944.486 merupakan penyelesaian Pembangunan Gedung kantor, Terminal dan UPPKB dengan nilai signifikan sebesar Rp105.306.835.275 pada BPTD Kelas II Jateng berupa Pembangunan Terminal Tipe A Demak dan Mangkang serta UPPKB, sebesar Rp80.020.347.829 pada BPTD Kelas II Jatim berupa Terminal Arjosari, Tawang Alun, Banyuwangga, dan Kertonegoro, Sebesar Rp108.005.090.239 pada BPTD Kelas II Kalbar berupa TBI Aruk, sebesar Rp76.851.772.601 pada BPTD Kelas II Sultra berupa Pembangunan UPPKB Sambilambo, UPPKB Moramo dan Gedung Kantor BPTD sebesar Rp62.027.959.193 pada BPTD Kelas II Maluku
5. Pengembangan Aset langsung pada BPLJSKB Bekasi sebesar Rp199.850.000 berupa peningkatan dinding kantor;
6. Transaksi Perolehan Lainnya dengan nilai signifikan sebesar Rp24.919.492.824 yang terdapat pada 2 satker yaitu BPTD Kelas II Banten dan BPTD Kelas II Jabar;
7. Reklasifikasi Aset Konsesi Jasa menjadi BMN sebesar Rp45.181.854.430 pada satker KSOPP Danau Toba yang akan dilakukan perbaikan pencatatan berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Jenderal;
8. Penggunaan kembali BMN yang sudah aktif sebesar Rp41.076.461.713 pada BPTD Kelas II Sumbar berupa Bangunan Dermaga Siberut dan Dermaga Sikakap yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Mentawai. Transaksi ini dilakukan untuk mengaktifkan BMN yang akan dihibahkan dengan kondisi rusak berat yang tidak bisa menggunakan menu hibah keluar;
9. Koreksi Pencatatan nilai bertambah dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Jateng sebesar Rp55.056.018.648 merupakan transaksi rehabilitasi Terminal Tingkir dan Terminal Tidar, sebesar Rp11.327.600.784 pada BPTD Kelas II Kaltim dan sebesar Rp838.499.855 pada BPTD Kelas II Sultra;
10. Koreksi Pencatatan dengan nilai signifikan sebesar Rp118.442.683.034 pada BPTD Kelas II NTT untuk penyesuaian pencatatan aset Terminal Tipe A Bimoku dan ALBN sesuai dengan

RAB Kontrak dan sebesar Rp25.131.267.829 pada BPTD Kelas II NTB untuk penyesuaian pencatatan Aset Terminal Mandalika sesuai dengan RAB Kontrak;

11. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp17.760.797.100 dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Banten sebesar Rp210.549.175, BPTD Kelas II Jabar sebesar Rp209.391.079, BPTD Kelas II Jatim sebesar Rp1.503.038.289, BPTD Maluku sebesar Rp150.000.000 yang merupakan koreksi tindak lanjut atas temuan kelebihan pembayaran dan BPTD Kelas II Sultra sebesar Rp15.093.275.669 untuk perbaikan pencatatan Gedung Kantor dan UPPKB Sambilambo dan Moramo;
12. Hibah Keluar dengan rincian signifikan terdapat pada:
 - a. Rp7.067.373.509 pada BPTD Kelas III Yogyakarta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa TTA Giwangan;
 - b. Rp41.475.524.713 pada BPTD Kelas II Sumbar kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa Pelabuhan Penyeberangan Sikakap, Tua Pejat, dan Siberut;
 - c. Rp4.902.435.000 pada BPTD Kelas II Kalbar Pemerintah Kabupaten Sekadau berupa Dermaga Sei Asam;
 - d. Rp38.671.789.220 pada BPTD Kelas II NTT Pelabuhan Penyeberangan Waingapu dan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita serta Aimere yang diserahkan pada Pemprov NTT;
 - e. Rp9.386.744.000 pada BPTD Kelas II Sulawesi Tengah berupa Hibah Gedung Bangunan Pelabuhan Penyeberangan Wakai, Toli-Toli, Banggai dan Saiyong yang diserahkan kepada Pemprov Sulawesi Tengah;
13. Transfer Keluar dengan sebesar Rp334.203.618.600, dengan nilai Rp221.867.462.105 merupakan pengalihan Aset dari BPTD Kelas II Jateng ke Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi, sebesar Rp31.248.327.195 merupakan transfer Gedung Fasilitas pelayanan kendaraan bermotor dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang diserahkan kepada satker BPLJSKB Bekasi, sebesar Rp1.388.885.730 merupakan transfer aset ke UPBU Komodo berupa Bangunan Halte/Shelter BRT Komodo;

14. Penghentian aset dari penggunaan dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II NTT sebesar Rp28.190.475.817 berupa Dermaga Penyeberangan Raijua yang akan dilakukan penghapusan sesuai dengan CHR Itjen;
15. Penghapusan BMN sebesar Rp27.117.209.000 pada BPTD Kelas II Bali merupakan penghapusan Dermaga Bedugul Tabanan sebagai tindak lanjut hibah kepada Pemkab Tabanan, sebesar Rp3.705.627.000 pada BPTD Kelas II Sulut merupakan penghapusan sebagian bongkaran Terminal Malalayang, dan sebesar Rp3.674.720.500 pada BPLJSKB Bekasi sebagai tindak lanjut KSPI, sebesar Rp2.510.356.258 Kelas II Lampung, sebesar Rp5.246.122.208 pada BPTD Kelas II Jateng karena lelang bongkaran UPPKB Wanareja dan Terminal Cepu.

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
**Rp2,85
triliun**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.855.901.415.298** dan **Rp2.803.235.837.451**. Terjadi Peningkatan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp52.665.577.847 atau sebesar 1,88 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan
A	B	C
000	Saldo Awal TAYL	2.803.235.837.451
100	Saldo Awal	86.892.745.013
101	Pembelian	96.857.056
102	Transfer Masuk	41.761.694.670
107	Reklasifikasi Masuk	370.029.064
112	Perolehan Lainnya	11.017.018.058
167	Reklasifikasi Dari Aset Konsesi Jasa ke Aset Tetap	164.830.939.205
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	197.829.750
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	82.231.860.605
208	Pengembangan Melalui KDP	2.153.855.877
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.341.190.355)
302	Transfer Keluar	(41.761.694.670)
303	Hibah Keluar	(130.407.400.343)
305	Koreksi Pencatatan	(116.986.362.458)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(72.795.059.625)

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan
A	B	C
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	26.404.456.000
921	Internal Transfer Keluar	(913.759.594)
922	Internal Transfer Masuk	913.759.594
Jumlah		2.855.901.415.298

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp86.892.745.013 dengan Nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Sumut sebesar Rp84.074.643.013 merupakan pencatatan perbaikan pencatatan Dermaga Sipinggian dan Dermaga Onan Rungu dan sebesar Rp1.239.392.000 pada BPTD Kelas II Sulut merupakan perbaikan pencatatan Jembatan Labuh Sandar Terminal pada Dermaga Bunaken;
2. Reklasifikasi dari Aset Konjas Ke Aset Tetap sebesar Rp 122.310.137.512,00 pada KSOPP Danau Toba berupa Pelabuhan Ajibata dan sebesar Rp42.520.801.693 pada BPLJSKB Bekasi;
3. Perolehan Lainnya sebesar Rp11.017.018.058 dengan nilai sebesar Rp151.411.557 pada BPLJSKB Bekasi untuk pencatatan pengadaan Grill Besi karena kesalahan mata anggaran (menggunakan belanja pemeliharaan GB), sebesar Rp9.515.143.575 pada BPTD Kelas II NTT merupakan perbaikan pencatatan Aset Pelabuhan Penyeberangan Rajjua, dan sebesar Rp1.470.184.151 pada BPTD Kelas II Sultra untuk pemecahan aset UPPKB Sambilambo dan UPPKB Moramo.
4. Hibah Keluar sebesar Rp130.407.400.343 dengan nilai signifikan pada:
 - a. BPTD Kelas III Yogyakarta sebesar Rp1.493.100.000 berupa Jalan Khusus Komplek pada Terminal Giwangan kepada Pemkot Yogyakarta;
 - b. BPTD Kelas II Sumbar sebesar Rp11.067.784.000 berupa Dermaga Sikakap yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar;

- c. BPTD Kelas II Kalbar sebesar Rp32.026.904.000 berupa Hibah Dermaga Sei Asam yang diserahkan kepada Pemerintah Kab Sekadau;
 - d. BPTD Kelas II Kalteng sebesar Rp23.129.037.000 berupa Hibah Dermaga Kumai untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat;
 - e. BPTD Kelas II Sulteng sebesar Rp27.885.855.000 berupa Hibah Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Banggai, Toli-Toli, Wakai, dan Saiyong yang diserahkan kepada Pemda Sulteng;
 - f. BPTD Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp17.907.754.000 berupa Dermaga Dompok yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - g. BPTD Kelas III Kalimantan Utara sebesar Rp16.896.966.343 berupa Bangunan Dermaga Sei Jepun dan Liang Bunyu Sebatik kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan;
5. Koreksi Pencatatan sebesar Rp116.986.362.458 pada BPTD Kelas II Sumut merupakan perbaikan pencatatan Dermaga Sipinggian, Dermaga Gunung Sitoli, dan Dermaga Onan Rungu;
 6. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dengan nilai signifikan pada BPTD Kelas II Sumbar sebesar Rp29.010.108.300 merupakan koreksi penggabungan termin Dermaga Bungus Tahap 1-4, sebesar Rp440.255.925 pada BPTD Kelas II Sultra berupa perbaikan pencatatan aset UPPKB Moramo;
 7. Penggunaan Kembali BMN dihentikan sebesar Rp26.404.456.000 pada BPTD Kelas II Maluku Utara berupa Dermaga Daruba Morotai;
 8. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp42.520.801.693 pada BPLJSKB Bekasi merupakan transaksi proses penghentian aset jalan khusus lainnya (test track) yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan.

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp187,33 miliar

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp187.338.611.686** dan **Rp208.760.285.317**.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TETAP LAINNYA				
Aset Tetap Renovasi	174.589.990.546	195.912.236.926	(21.322.246.380)	(10,88)
Aset Tetap Lainnya	12.748.621.140	12.848.048.391	(99.427.251)	(0,77)
Jumlah	187.338.611.686	208.760.285.317	(21.421.673.631)	(10,26)

Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Terjadi penurunan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.421.673.631 atau 10,26 persen dibandingkan Tahun 2023.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya
A	B	C
000	Saldo Awal	208.760.285.317
101	Pembelian	7.821.460.528
102	Transfer Masuk	24.091.642.621
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	199.189.599
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(13.381.500)
302	Transfer Keluar	(24.041.065.000)
303	Hibah Keluar	(24.538.823.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(4.841.269.628)
305	Koreksi Pencatatan	(99.427.251)
	Jumlah	187.338.611.686,

1. Pembelian sebesar Rp7.821.460.528 dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Sulsel sebesar Rp4.796.931.970 merupakan Pembangunan termin terakhir Pelabuhan Selayar yang salah pemilihan kode barang;

2. Transfer Masuk sebesar Rp24.041.065.000 merupakan transaksi dari satker BPTD Kelas II Sulsel ke BPTD Kelas III Sulbar dan dari Satpel Wilayah III Biro LPPBMN kepada BPTD Kelas III DIY;
3. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp13.381.500 pada satker Setditjen Hubdat merupakan koreksi perbaikan pencatatan ruang monitoring;
4. Sebesar Rp24.538.823.000 merupakan transaksi hibah keluar pada:
 - a. BPTD Kelas II Sumbar sebesar Rp451.212.000 berupa Rehab Dermaga Tua Pejat dan Sikakap yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. BPTD Kelas II NTT sebesar Rp8.201.651.000 berupa pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Teluk Gurita dan Aimere yang diserahkan kepada Pemprov NTT;
 - c. BPTD Kelas II Sulteng sebesar Rp735.000.000 berupa Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Luwuk yang diserahkan kepada Pemprov Sulteng;
 - d. BPTD Kelas II Kalbar sebesar Rp15.150.960.000 berupa hibah DED dan Fisik Dermaga Penyeberangan Bardan Siantan yang diserahkan kepada Pemkot Pontianak;

Rincian Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2024 dan Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp1,264
triliun*

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.264.965.616.632** dan **Rp971.159.012.851**. Terjadi kenaikan nilai KDP dibandingkan dengan Tahun Rp293.806.603.781 atau 30,25 persen.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
**Rp8,42
triliun**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **8.428.150.013.150** dan **Rp7.633.960.973.173**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.768.007.255.178	6.224.585.082.371	543.422.172.807	8,73
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	800.790.979.377	693.063.797.485	107.727.181.892	15,54
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	859.329.778.595	716.290.093.317	143.039.685.278	19,97
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.000.000	22.000.000	0	0
Jumlah	8.428.150.013.150	7.633.960.973.173	794.189.039.977	10,40

C.17 Aset Konsesi Jasa

Aset
Konsesi
Jasa
**Rp1,167
triliun**

Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.167.531.713.498** dan **Rp283.558.253.098**. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang: 1) disediakan oleh mitra, yang: (a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (b)

merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: (1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rincian Aset Konsesi Jasa

Uraian	31 Desember 2024 <i>Audited</i>	31 Desember 2023 <i>(Audited)</i>	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET KONSESI JASA				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	66.926.543.498	110.113.394.511	(43.186.851.013)	(39,22)
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	1.100.605.170.000	0		
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba	0	173.444.858.587	(173.444.858.587)	(100,00)
Jumlah	1.167.531.713.498	283.558.253.098	(216.631.709.600)	(76,40)

Mutasi Aset Konsesi Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi kembali BMN dari Aset Konsesi Jasa ke Aset Tetap pada KSOPP Danau Toba sebesar Rp173.444.858.587, dalam rangka perbaikan pencacatan Aset Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO);
2. Penghapusan Aset Konsesi Jasa - Partisipasi Pemerintah pada BPLJSKB sebesar Rp43.186.851.013, terkait penghapusan BMN yang terdampak Proyek KPBU *Proving Ground* berupa;
3. Pengakuan Aset Konsesi Jasa - Partisipasi Mitra pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp1.100.605.170.000 sebagai tindak lanjut hasil realisasi Investasi/Pembangunan Proyek KPBU *Proving Ground* di BPLJSKB selama Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Nomor PL.108/0374/DSTJ/XI/2024 dan Laporan Keuangan PT. Indonesia *International Automotive Proving Ground* (IIAPG) per 30 September 2024.

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Akumulasi
Penyusutan
Aset
Konsesi
Jasa
**Rp59,63
miliar**

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp59.630.236.097** dan **Rp96.962.170.771**.

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa merupakan kontra akun Aset Konsesi Jasa yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Konsesi Jasa selain untuk Aset Konsesi Jasa Dalam Pengerjaan.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KONSESI JASA				
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	59.630.236.097	0	59.630.236.097	0
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	0	0	0
Jumlah	59.630.236.097	0	59.630.236.097	0

C.19 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp0

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp0** dan **Rp24.004.286**.

C.20 Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan
Piutang
Tagihan
TP/TGR
Rp0

Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp0** dan **Rp120.021**.

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp782,3 miliar

Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp782.361.028.048** dan **Rp760.184.388.326**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.176.639.722 atau 2,92 persen dibandingkan Tahun 2023

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
Patent	0	0	0	0
Software	37.888.261.218	35.725.630.558	2.162.630.660	6,05
Lisensi	941.602.970	742.912.970	198.690.000	26,74
Hasil Kajian/Penelitian	602.755.441.119	557.866.610.509	44.888.830.610	8,05
Aset Tak Berwujud Lainnya	140.775.722.741	165.849.234.289	(25.073.511.548)	(15,12)
Jumlah	782.361.028.048	760.184.388.326	22.176.639.722	2,92

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
A	B	C
000	Saldo Awal TAYL	760.184.388.326,00
100	Saldo Awal	1.091.595.950,00
101	Pembelian	5.844.561.918,00
102	Transfer Masuk	22.925.567.624,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	98.435.585.098,00
107	Reklasifikasi Masuk	133.494.000,00
112	Perolehan Lainnya	3.435.054.992,00
193	Batal Transfer Keluar	1.234.056.900,00
208	Pengembangan Melalui KDP	9.343.230.396,00
214	Koreksi Susulan	(1.091.595.950,00)
301	Penghapusan	(14.729.132.300,00)
302	Transfer Keluar	(24.159.624.524,00)
303	Hibah Keluar	(1.968.517.975,00)
305	Koreksi Pencatatan	(14.463.620.874,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(63.465.330.533,00)
	Jumlah	782.361.028.048,

1. Saldo Awal sebesar Rp1.091.595.950 terdapat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan transaksi tindak lanjut pemecahan aset;
2. Pembelian dengan nilai signifikan terdapat pada Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp1.122.618.924 dan BPTD Kelas II Bali sebesar Rp873.261.120;
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan nilai signifikan sebesar Rp60.231.842.031 terdapat pada Direktorat Angkutan Jalan yang merupakan DED Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) Bus Rapid Transit (BRT) Detailed Engineering Design dan Medan Binjai Deli Serdang (Mebidang) Bus Rapid Transit Detailed Engineering Design, sebesar Rp13.350.660.697 pada Direktorat TSDP, sebesar Rp12.211.617.600 pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa DED Revitalisasi Terminal dan Integrasi Moda, sebesar Rp12.149.235.270 pada Setditjen Hubdat berupa studi Pembangunan IKN;
4. Penghapusan sebesar Rp21.214.657.288 terdapat pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa penghapusan Hasil Kajian dan ATB Lainnya perolehan Tahun 2018, 2021, dan 2022 yang sudah tidak relevan sesuai dengan Surat Persetujuan KPKNL Nomor S-329/MK.6/KNL.0701/2023; Penghapusan sebesar Rp5.610.601.000 terdapat pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan berupa Software Komputer, Hasil Kajian Perlengkapan Jalan, dan Studi Manajemen dan Dokumen Audit Teknis Pelabuhan yang sudah usang/tidak relevan;
5. Hibah Keluar sebesar Rp1.968.517.975, dengan nilai sebesar Rp1.120.090.909 terdapat pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Penyusunan Feasibility Study (FS) dan DED Pelabuhan Sungai Raya di Kabupaten Kubu Utara dan sebesar Rp848.427.066 pada BPTD Kelas II Provinsi Jambi berupa Penyusunan DED Fasilitas Darat dan Ponton Dermaga Angso Duo yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi;
6. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp63.465.330.533 diantaranya terdapat pada Direktorat Angkutan Jalan sebesar

Rp39.499.193.195 berupa hasil kajian dan software computer, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp11.643.979.050, dan Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan sebesar Rp12.194.416.488;

7. Terdapat selisih Transfer Keluar sebesar Rp945.538.000 merupakan Transfer Keluar BMN berupa FS Fasilitas Integrasi Moda di Kawasan Pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Gilimanuk yang diserahkan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dalam rangka mendukung proses percepatan pembangunan Sky Bridge Stasiun Ketapang dan Pelabuhan ASDP Ketapang;

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan Mutasi Aset Tak Berwujud per Satker terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.22 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

ATB dalam Pengerjaan
Rp0

Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp9.839.577.483**.

C.23 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Rp355,5 miliar

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp355.597.225.461** dan **Rp334.103.417.063**.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Dari saldo

Rp355.597.225.461, dana RPATA dapat diuraikan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. Pekerjaan **terselesaikan 100%** s.d. akhir Tahun Anggaran, namun Dana RPATA baru dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya (Januari 2025) sebesar Rp253.776.515.208;
2. Pekerjaan **tidak terselesaikan** s.d. akhir Tahun Anggaran, namun **diberikan kesempatan penyelesaian** ke Tahun Anggaran berikutnya sebesar Rp44.263.554.522, dan
3. Pekerjaan **tidak terselesaikan** s.d. 31 Desember 2024 dan **tidak diberikan kesempatan** penyelesaian ke Tahun Anggaran berikutnya, sehingga Dana RPATA dikembalikan ke Kas Negara (RPATA Nihil) sebesar Rp57.557.155.731.

Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini

C.24 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain
Rp1,74
triliun

Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.740.689.786.729** dan **Rp2.132.154.387.743**. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN dan BMN yang sedang dalam proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	812.658.043.244	868.819.351.058	(56.161.307.814)	(6,46)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	77.911.524.100	77.911.524.100	0	0
BMN dalam Proses PMPP	850.120.219.385	1.185.423.512.585	(335.303.293.200)	(28,29)
Jumlah	1.740.689.786.729	2.132.154.387.743	(391.464.601.014)	(18,36)

Aset Lain-lain mengalami penurunan sebesar Ro464.843.237.014 atau sebesar 21,80 persen dibandingkan Tahun 2023. Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7/PB.6/2024, terhadap BMN yang telah mendapatkan persetujuan dalam proses Penyertaan Modal Pemerintah agar melakukan reklasifikasi ke akun BMN dalam Proses PMPP yang terdapat pada satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Angkutan Jalan, BPTD Kelas II Sumsel, BPTD Kelas II Maluku Utara, BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur, BPTD Kelas II Sulawesi Selatan, dan KSOPP Danau Toba.

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
**Rp1,12
triliun***

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.121.823.518.389** dan **Rp1.216.167.659.463**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan terhadap ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang
kepada
Pihak Ketiga
**Rp247,86
miliar***

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp247.866.130.020** dan **Rp223.828.212.864**.

Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA				
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	14.985.000	13.485.000	1.500.000	11,12
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayara	485.996.060	485.996.060	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	247.365.148.960	223.328.731.804	24.036.417.156	10,76
Jumlah	247.866.130.020	223.828.212.864	24.037.917.156	10,74

Uraian Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar**, yang terdapat pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat sebesar Rp6.385.500 dan BPTD Kelas II Aceh sebesar Rp6.599.500, keduanya merupakan pengadaan Barang Persediaan Konsumsi yang telah diterima, namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023, sebesar Rp1.500.000 pada BPLJSKB Bekasi merupakan pengakuan utang atas tagihan biaya iuran Tahunan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Tahun 2024;
2. **Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar**, yang terdapat pada BPTD Kalimantan Barat sebesar Rp485.996.060, yang merupakan kekuarangan pembayaran atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lokasi Rawan Kecelakaan APJ dan Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Sungai Rasau Jaya.
3. **Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya**
 - a. sebesar Rp246.791.971.812 merupakan pengakuan utang yang atas progres pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023;
 - b. sebesar Rp573.177.148 merupakan pungutan Tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau yang menjadi hak pihak ketiga (operator Kapal), yang belum ditransfer sampai dengan 31 Desember 2024.

C.27 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp17,67 juta

Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp17.675.000** dan **Rp303.539.188**. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan/jasa pelayanan belum dilaksanakan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada BLU BPLJSKB yang merupakan pendapatan dari pelayanan yang sudah diterima s.d. 31 Desember 2024, namun pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor baru dilaksanakan pada tahun 2025.

C.28 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp744,8 juta

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp744.819.613** dan **Rp146.455.531**. Uang Muka dari Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN terdapat pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Terhadap saldo Uang Muka dari KPPN tersebut, pada Tahun 2025 bulan Januari telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp35,49 juta

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp35.493.552** dan **Rp485.620**.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal akhir pelaporan belum disetor ke Kas Negara. Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran terdapat pada BPTD Kelas II Sulawesi Utara.

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran, telah disetorkan oleh satker ke Kas Negara, sebagai berikut:

Kode Akun Pajak	Jenis Setoran	Nominal (Rp.)	Tanggal Setor	NTP/NTB	NTPN
411128	409	1.826.275	13 Januari 2025	980916787380	D6D9B5BBSK25UL79
411211	910	5.739.721	13 Januari 2025	230168952070	C42180T8DF67EPJ7
411122	910	2.399.203	13 Januari 2025	488561893410	7C9562M3D48KPN9Q
411211	910	17.594.153	13 Januari 2025	863721252599	6175F4EUCPDDH87S
411124	104	2.819.600	17 Januari 2025	940187175336	EC2215BB5KCQDQLC
411124	104	169.600	17 Januari 2025	940189175348	B69DF5BBSKCFQ3C
411124	104	2.660.000	17 Januari 2025	940180175305	74FE85BBSKCPU5LC
411124	104	160.000	17 Januari 2025	940183175320	8DDFA2M3D4LL39BK
411124	104	1.820.000	17 Januari 2025	940191175407	1151B00QTKUH84NU
411121	100	305.000	17 Januari 2025	940193175418	F4CE90T8DFH20GAE
TOTAL		35.493.552			

C.30 Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban
Konsesi
Jasa
**Rp1,1
triliun**

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.100.605.170.000** dan **Rp0**.

Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, di mana pemerintah memberikan hak kepada mitra untuk mengelola aset dan memberikan jasa publik. Kewajiban ini mencakup pembayaran kepada mitra, penyerahan aset, atau kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian.

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa pada Ditjen Perhubungan Darat terdapat pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang merupakan pengakuan Kewajiban Konsesi Jasa Pembayaran kepada Mitra terkait Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) atas Proyek KPBU *Proving Ground* BPLJSKB.

C.31 Ekuitas

Ekuitas
Rp18,519
triliun

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp18.461.358.302.810** dan **Rp18.762.443.141.913**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit LO. Kegiatan operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar **Rp1.221.248.296.201** dan **Rp1.320.343.843.333**. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
Negara
Bukan
Pajak
Lainnya
Rp1,22
triliun*

Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Akun	Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	21.024.135.500
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari	0	1.415.010
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	16.438.387
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	20.911.812
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1.390.500
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.778.714.072	8.626.420.953
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	124.000
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	806.919.720	223.030.754
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	4.536.770.718
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	105.424.160
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang	41.074.200.001	58.332.000.001
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.084.608.990.000	1.141.807.995.000
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	7.008.326.256	5.825.047.325
425514	Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	31.384.000	31.123.000
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	5.508.987.503	4.579.101.890
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	64.901.294.535	68.887.861.830
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	4.137.684	14.180.780
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.234	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.596.106.590	3.648.803.872
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	18.874.264
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	929.234.606	2.642.793.577
	Jumlah	1.221.248.296.201	1.320.343.843.333

Terjadi penurunan pada Pendapatan Bukan Pajak Lainnya karena perubahan metode penyajian Pendapatan Badan Layanan Umum yang sebelumnya merupakan bagian dari Pendapatan Bukan Pajak Lainnya. namun mulai pelaporan tahun 2024 disajikan secara terpisah. Disamping itu, penurunan yang paling signifikan terdapat pada Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp57.199.005.000 yang merupakan pendapatan dari pelayanan Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

D.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan
Badan
Layanan
Umum
**Rp17,7
miliar**

Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar **Rp17.681.277.598** dan **Rp0**. Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum

Akun	Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:			
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	16.930.230.000	0
Pendapatan Lain-lain BLU:			
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	22.183.510	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	295.810.289	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	122.003.188	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.000.000	0
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	463.500	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	24.271.711	0
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	7.730.400	0
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	120.109.000	0
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	157.476.000	0
Jumlah		17.681.277.598	0

Pendapatan BLU hanya berasal dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi dari pelayanan penyediaan jasa layanan umum dari pengujian tipe kendaraan bermotor, pengujian sampel kendaraan bermotor, pengujian konversi kendaraan bermotor, dan pengujian prototipe kendaraan bermotor. Disamping itu, BPLJSKB juga menghasilkan pendapatan lain-lain dari pendapatan hasil kerja sama dengan Lembaga/Badan Usaha lainnya, dan pendapatan dari pengelolaan BMN.

Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 (*Audited*) masih bernilai Rp0 (nol) karena secara penyajian masih tergabung pada penyajian nilai Pendapatan Bukan Pajak Lainnya.

BEBAN OPERASIONAL

D.3 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp661,72
miliar*

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp661.720.639.858** dan **Rp560.902.286.762**.

Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	232.789.512.733	203.775.696.669	14,24
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.746.862	3.465.671	8,11
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	14.395.336.828	13.554.545.841	6,20
Beban Tunj. Anak PNS	4.140.939.474	3.932.921.267	5,29
Beban Tunj. Struktural PNS	2.220.181.200	2.054.940.000	8,04
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.523.708.800	1.415.041.992	7,68
Beban Tunj. PPh PNS	2.668.737.124	1.433.698.753	86,14
Beban Tunj. Beras PNS	12.082.741.570	12.006.079.866	0,64
Beban Uang Makan PNS	35.718.341.700	36.026.732.200	(0,86)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	417.695.000	313.345.000	33,30
Beban Tunjangan Umum PNS	11.891.333.332	11.311.577.284	5,13
Beban Gaji Pokok PPPK	11.952.970.600	2.229.452.000	436,14
Beban Pembulatan Gaji PPPK	245.361	20.626	1.089,57
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	618.566.810	99.394.720	522,33
Beban Tunjangan Anak PPPK	134.950.840	21.676.266	522,57
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.044.445.000	195.300.000	434,79
Beban Tunjangan Beras PPPK	672.419.700	126.445.320	431,79
Beban Uang Makan PPPK	2.320.435.000	552.825.000	319,74
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	3.900.000	1.300.000	200,00
Beban Tunjangan Umum PPPK	0	552.184.550	(100,00)
Beban Uang Lembur	13.843.661.250	14.721.138.700	(5,96)
Beban Uang Lembur PPPK	142.216.000	5.902.000	2.309,62
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	297.979.024.923	254.408.558.448	17,13
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	15.155.529.751	2.160.044.589	601,63
Jumlah	661.720.639.858	560.902.286.762	17,97

Kenaikan signifikan pada komponen dari Beban Pegawai terdapat pada Beban Pegawai PPPK yang disebabkan karena adanya kenaikan jumlah pegawai PPPK pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

D.4 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
**Rp55,18
miliar**

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dan pencatatan dilakukan pada akhir periode akuntansi.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp55.177.229.364** dan **Rp72.668.601.439**

Rincian Beban Persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2023 (<i>Audited</i>)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	54.184.491.358	72.406.223.664	(25,17)
Beban Persediaan bahan baku	227.147.840	146.010.475	55,57
Beban persediaan lainnya	765.590.166	116.367.300	557,91
Jumlah	55.177.229.364	72.668.601.439	(24,07)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Beban
Persediaan
**Rp2,52
triliun**

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp2.518.121.755.638** dan **Rp2.305.355.604.699**.

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	288.859.164.525	312.215.308.713	(7,48)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	30.564.650.428	30.311.217.014	0,84
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	851.259.590	1.598.704.109	(46,75)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	10.906.019.400	16.980.423.000	(35,77)
Beban Barang Operasional Lainnya	533.820.790.741	419.505.189.840	27,25
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.212.243.116	(100,00)
Beban Bahan	22.740.654.578	22.716.351.788	0,11
Beban Honor Output Kegiatan	64.931.004.672	31.709.966.279	104,77
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.371.019.533.236	1.298.582.574.861	5,58
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2.235.491.114	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	874.419.920	369.488.094	136,66
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	59.854.000	0	0
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	59.595.270	0	0
Beban Langganan Listrik	17.229.593.354	12.103.510.371	42,35
Beban Langganan Telepon	2.414.784.846	2.379.038.450	1,50
Beban Langganan Air	861.439.026	543.656.691	58,45
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	34.758.840.004	32.112.474.996	8,24
Beban Jasa Konsultan	11.646.748.430	12.906.650.470	(9,76)
Beban Sewa	81.688.371.988	74.004.179.396	10,38
Beban Jasa Profesi	6.614.678.000	6.865.227.040	(3,65)
Beban Jasa Lainnya	34.354.645.098	26.409.919.793	30,08
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	230.000	(100,00)
Beban Barang	1.709.009.688	0	0
Beban Jasa	1.050.302.932	30.690.900	3.322,20
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	101.130.000	0	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	19.980.000	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	985.285.912	488.754.664	101,59
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU	0	72.255.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya - BLU	0	2.059.000	(100,00)
Jumlah	2.518.121.755.638	2.305.355.604.699	9,23

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa dengan kenaikan nilai yang signifikan terdapat pada akun Beban Jasa Langganan Listrik, Beban Jasa Langganan Air. Disamping itu, Beban Jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan terdapat pada satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor untuk kegiatan operasional pengujian.

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp297,16 miliar

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp297.156.124.341** dan **Rp208.652.493.645**.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.943.687.645	103.863.256.733	(10,51)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	19.940.500	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	59.888.000	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.557.209.377	90.073.731.558	103,79
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	5.311.499.023	3.692.731.524	43,84
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.111.880.613	213.791.550	887,82
Beban Pemeliharaan Jaringan	182.560.000	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	3.779.835.997	939.671.827	302,25
Beban Pemeliharaan	7.390.263.440	7.515.989.497	(1,67)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.442.823.055	1.925.633.780	(25,07)
Beban Persediaan suku cadang	336.776.691	194.387.726	73,25
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	19.760.000	233.299.450	(91,53)
Jumlah	297.156.124.341	208.652.493.645	42,42

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 (*Audited*) mengalami kenaikan signifikan pada Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Beban Pemeliharaan Mesin Lainnya.

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
**Rp335,10
miliar**

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp335.100.875.386** dan **Rp288.640.496.158**.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	258.799.199.383	227.221.462.575	13,90
Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.836.215.237	726.339.064	152,80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.486.279.778	2.616.916.092	224,29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.738.193.224	22.428.832.482	10,30
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.674.668.153	31.265.625.820	(86,77)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	4.136.467.558	4.381.320.125	0
Beban Perjalanan	2.429.852.053	0	0
Jumlah	335.100.875.386	288.640.496.158	16,10

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 (*Audited*) mengalami kenaikan sebesar 16,10 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2023 (*Audited*). Kenaikan signifikan terdapat pada akun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, dimana nilai terbesar diantaranya terdapat pada:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Barat senilai Rp1.585.068.796;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Timur senilai Rp1.860.448.000;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Banten senilai Rp1.079.646.000.

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
**Rp883,03
miliar**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan barang yang dibeli oleh pemerintah dalam bentuk barang atau jasa untuk diserahkan kepada masyarakat.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp883.034.290.525** dan **Rp1.657.935.682.182**.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	353.325.609.344	336.810.018.810	4,90
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	90.679.317.717	215.905.002.218	(58,00)
Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	257.400.000	415.249.191.484	(99,94)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	13.245.024.000	(100,00)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	943.492.000	0	0
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	437.828.471.464	676.726.445.670	(35,30)
Jumlah	883.034.290.525	1.657.935.682.182	(46,74)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2024 (Audited) mengalami penurunan sebanyak 49.57 persen. Apabila dilihat dari tabel di atas, terdapat kenaikan signifikan pada beban persediaan jalan, irigasi dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan penurunan pada beban persediaan aset tetap lainnya lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
**Rp1,17
triliun**

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) adalah masing-masing sebesar **Rp1.174.945.384.937** dan **Rp1.205.180.021.813**. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	757.949.457.026	853.501.605.298	(11,20)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	133.080.048.770	116.914.646.277	13,83
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	40.451.127.906	44.246.632.138	(8,58)
Beban Penyusutan Irigasi	135.563.844.244	131.877.716.176	2,80
Beban Penyusutan Jaringan	2.823.031.549	2.926.719.634	(3,54)
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	5.772.869.992	12.229.518.614	(52,80)
Beban Amortisasi Software	5.394.496.411	6.286.327.505	(14,19)
Beban Amortisasi Lisensi	94.160.297	66.579.461	41,43
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	19.528.775	19.528.775	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	64.575.871.165	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	29.220.948.802	37.110.747.935	(21,26)
Jumlah	1.174.945.384.937	1.205.180.021.813	(2,51)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(9.103)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) adalah masing-masing sebesar **Rp(9.103)** dan **Rp81.371.721**.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terdapat pada BPTD Kelas II Riau atas penyelesaian Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi.

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus
(Defisit) dari
Kegiatan
Non
Operasional
Rp(604,65)
miliar

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (Audited) dan 31 Desember 2023 (Audited) adalah masing-masing sebesar **Rp(604.646.182.332)** dan **Rp(406.093.313.270)**.

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.075.573.916	2.526.190.294	21,75
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(621.554.701.888)	(366.323.768.095)	69,67
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	30.289.316.722	19.708.061.458	53,69
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(16.456.371.082)	(62.003.796.927)	(73,46)
Jumlah	(604.646.182.332)	(406.093.313.270)	48,89

E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

*Ekuitas
Awal
Rp18,76
triliun*

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp18.762.443.141.913** dan **Rp19.655.203.097.831**. Nilai Ekuitas Awal tahun 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember tahun 2023 (*Audited*).

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

*Defisit - LO
Rp5,29
triliun*

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar **Rp(5.290.972.899.479)** dan **Rp(5.385.166.028.356)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

E.4.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
Rp0,00*

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp0**.

E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,00*

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp70,60
miliar*

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp70.605.218.228** dan **Rp134.108.111.777**. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan

karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan disebabkan karena kesalahan penginputan persediaan.

E.4.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp1,56
miliar*

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp1.557.835.069** dan **Rp(4.437.004.419)**. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk persediaan. aset tetap dan aset lainnya.

E.4.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

E.4.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
Rp(111,65)
miliar*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar **Rp(111.658.459.227)** dan **Rp(138.394.755.678)**. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan nilai aset. antara lain disebabkan: pencatatan barang berlebih. kesalahan pemilihan kode barang dan/atau akun pada saat perekaman BAST Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada Modul Komitmen.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp54.319.115.551 dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp(165.977.574.778).

E.4.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi
Lain-lain
Rp203 juta

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar **Rp(203.022.333)** dan **Rp(2.841.377.327)**. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

Tabel 5.1 Rincian Koreksi Lainnya

Uraian	Nilai	Keterangan
Direktorat Angkutan Jalan	(372.382.600)	Jurnal Balik Pengakuan Kas di bendahara Penerimaan akibat Pendapatan yang belum disetorkan per 31 Desember 2023 dan Pendapatan yang masih harus diterima terkait Pendapatan Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS Bulan Desember 2023 yang baru diterima pada Januari 2024
Direktorat Angkutan Jalan	(84.269.733)	Jurnal Balik atas Jurnal Balik Pengakuan Kas di Bendahara Pengeluaran terkait Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas (Kegiatan Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) - PHLN) yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023
BPLJSKB	253.630.000	Jurnal Balik Terhadap Pendapatan BLU Yang Telah Diterima, namun belum diberikan Pelayanan Pengujian di Tahun 2023
Jumlah	(203.022.333)	

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi
antar
Entitas
Rp5,03
triliun

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp5.029.586.488.639** dan **Rp4.503.971.098.085**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L. antar K/L. antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Tabel 5.2 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.320.782.756.512
Diterima dari Entitas Lain	(1.311.868.860.266)
Transfer Keluar	(588.931.720.760)
Transfer Masuk	584.388.847.248
Pengesahan Hibah Langsung	21.898.849.905
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	3.316.616.000
Jumlah	5.029.586.488.639

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda. baik internal Kementerian/Lembaga. antar Kementerian/Lembaga. maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
2. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L. antar K/L. dan antara K/L dengan BA BUN;
3. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan. pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu dalam bentuk kas. barang. maupun jasa/surat berharga.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL
Rp1,31
triliun /
Rp6,32
triliun

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 (*Audited*). DDEL sebesar **Rp1.311.868.860.266** sedangkan DKEL sebesar **Rp6.320.782.756.512**.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
Masuk/
Transfer
Keluar
Rp584,3
miliar /
Rp588,9
miliar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L. antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp584.388.847.248**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp588.931.720.760**.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar memiliki nilai yang cukup besar. diantaranya merupakan:

1. Pemindahan pencatatan aset Terminal Penumpang Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD);

2. Pemindahan pencatatan aset akibat dari perubahan Organisasi (pemecahan) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD);
3. Transfer Blanko Tilang dan Blanko SPB dari Direktorat Lalu Lintas Jalan dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat.

Terdapat selisih transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar **Rp4.542.873.512.00**. merupakan perpindahan aset dari satu entitas ke entitas lain pada Eselon 1 lain di internal Kementerian Perhubungan dan Transfer Keluar (alih status) ke Kementerian/Lembaga lain. yaitu dari transaksi:

1. Transfer Masuk Hasil Renovasi Gedung Kantor yang digunakan untuk Ruang Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pengadaan dari Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN ke BPTD Kelas II Yogyakarta sebesar Rp176.818.458;
2. Transfer Masuk (alih status) Tanah (untuk gedung Kantor BPTD Kelas II Kep. Riau) dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3.982.480.000;
3. Transfer Masuk Hasil Kajian DED Integrasi Moda dari Balai Teknik Perkeretapian Kelas I Surabaya ke Direktorat Prasarana Jalan sebesar Rp945.538.000
4. Transfer Keluar Bangunan Halte BRT Komodo dari BPTD Kelas II NTT ke UPBU Komodo di Labuan Bajo sebesar Rp1.388.885.730;
5. Transfer Keluar Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan ke Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
6. Transfer Keluar Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan ke Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan sebesar Rp497.550.000;
7. Transfer Keluar (alih status) Kendaraan dari Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat kepada Kejaksaan Agung. sebesar Rp1.278.059.699;
8. Transfer Keluar (alih status) Bus Mikro dari Direktorat Angkutan Jalan kepada Komisi Yudisial. sebesar Rp514.111.400;
9. Transfer Keluar (alih status) Bus Mikro dari Direktorat Angkutan Jalan ke Mako Korps Marinir. Kementerian Pertahanan. sebesar Rp607.566.573;
10. Transfer Keluar (alih status) Bus Mikro dari Direktorat Angkutan Jalan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. II Palembang. sebesar Rp511.690.000;
11. Transfer Keluar (alih status) Bus Mikro dari Direktorat Angkutan Jalan ke Politeknik Negeri Ambon. sebesar Rp513.064.500;

12. Transfer Keluar (alih status) Bus Sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan kepada Kementerian Agama. dengan rincian:
- a. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebesar Rp224.633.571;
 - b. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebesar Rp170.571.428;
 - c. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebesar Rp300.856.679;
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebesar Rp169.916.812;
 - f. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang sebesar Rp246.428.572;
 - g. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin sebesar Rp257.780.001;
 - h. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Agam sebesar Rp531.712.777;
 - i. Madrasah Aliyah Negeri 5 Agam sebesar Rp531.712.777;
 - j. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebesar Rp562.560.754; dan
 - k. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala sebesar Rp537.421.349.

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Rp25,21 miliar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar **Rp25.215.465.905**.

Pengesahan Hibah Langsung terdiri dari Pengesahan Hibah Langsung senilai Rp21.898.849.905 dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL Rp3.316.616.000. Pengesahan Hibah Langsung berasal dari Hibah Masuk Tanah dari Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur di sektor transportasi jalan dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan Hibah Masuk Aset Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp18,46
triliun

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp18.461.358.302.810** dan **Rp18.762.443.141.913**.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada 3 (tiga) **Balai Pengelola Transportasi Darat** sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dengan rincian:

SEMULA (PM 6 TAHUN 2023)		MENJADI (PM 1 TAHUN 2025)		KET
NO	SATUAN KERJA	NO	SATUAN KERJA	
1.	BPTD Kelas II Jawa Barat	1.	BPTD Kelas I Jawa Barat	Naik kelas
2.	BPTD Kelas II Jawa Tengah	2.	BPTD Kelas I Jawa Tengah	Naik kelas
3.	BPTD Kelas II Aceh	3.	BPTD Kelas II Aceh	Tetap
4.	BPTD Kelas II Sumatera Utara	4.	BPTD Kelas II Sumatera Utara	Tetap
5.	BPTD Kelas II Sumatera Barat	5.	BPTD Kelas II Sumatera Barat	Tetap
6.	BPTD Kelas II Riau	6.	BPTD Kelas II Riau	Tetap
7.	BPTD Kelas II Jambi	7.	BPTD Kelas II Jambi	Tetap
8.	BPTD Kelas II Lampung	8.	BPTD Kelas II Lampung	Tetap
9.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	9.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	Tetap
10.	BPTD Kelas II Banten	10.	BPTD Kelas II Banten	Tetap
11.	BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	11.	BPTD Kelas II D.I. Yogyakarta	Naik kelas
12.	BPTD Kelas II Jawa Timur	12.	BPTD Kelas II Jawa Timur	Tetap
13.	BPTD Kelas II Bali	13.	BPTD Kelas II Bali	Tetap
14.	BPTD Kelas II NTT	14.	BPTD Kelas II NTT	Tetap
15.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	15.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Tetap
16.	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	16.	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	Tetap
17.	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	17.	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	Tetap
18.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	18.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	Tetap
19.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	19.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	Tetap
20.	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	20.	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Tetap
21.	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	21.	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	Tetap
22.	BPTD Kelas II Gorontalo	22.	BPTD Kelas II Gorontalo	Tetap
23.	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	23.	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	Tetap
24.	BPTD Kelas II Maluku	24.	BPTD Kelas II Maluku	Tetap
25.	BPTD Kelas II Maluku Utara	25.	BPTD Kelas II Maluku Utara	Tetap

SEMULA (PM 6 TAHUN 2023)		MENJADI (PM 1 TAHUN 2025)		KET
NO	SATUAN KERJA	NO	SATUAN KERJA	
26.	BPTD Kelas II Papua Barat	26.	BPTD Kelas II Papua Barat	Tetap
27.	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	27.	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	Tetap
28.	BPTD Kelas II NTB	28.	BPTD Kelas II NTB	Tetap
29.	BPTD Kelas II Papua	29.	BPTD Kelas II Papua	Tetap
30.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	30.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	Tetap
31.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	31.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	Tetap
32.	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	32.	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	Tetap
33.	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	33.	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	Tetap

Disamping itu, dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada terminal tipe A, telah dibentuk organisasi **Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi** yang mempunyai tugas melaksanakan penyediaan fasilitas, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi.

F.2 Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Eselon I, dengan hasil Penilaian Pengendalian Intern Efektif Dengan Pengecualian (PIEDP).

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu atas PIPK Tingkat UAPPA Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat TA. 2024, pada tabel E Penilaian Kelemahan Gabungan Eselon I masih terdapat kelemahan signifikan untuk akun Persediaan dan kelemahan tidak signifikan pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan. Kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kelemahan signifikan pada akun Persediaan di BPTD Maluku yaitu masih terdapat 14 BMN yang masih tercatat pada akun Persediaan senilai Rp244.617.042.959;
- b. Kelemahan tidak signifikan pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di BPTD Kalimantan Selatan yaitu masih terdapat KDP yang telah definitif belum dikategorikan berdasarkan klasifikasi aset yang sesuai.

F.3 Program Kegiatan Pembelian Layanan (*Buy the Service*)

Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Penumpang Angkutan Perkotaan.

Skema *Buy the Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau *quality licensing*. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, yang dimaksud dengan pembelian layanan angkutan perkotaan yang selanjutnya disebut pembelian layanan (*Buy the Service*) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Buy the Service adalah salah satu aspek penting dalam mereformasi sistem angkutan umum di kota-kota besar. Sistem ini pulalah yang menggantikan sistem lama angkutan perkotaan di beberapa kota besar yang selama ini berbasis setoran.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan mensubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan minimum yang ditetapkan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerja sama melalui kontrak dengan pihak ke-3 (swasta) sebagai manajemen pengelola (perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan), pengawasan operasional dengan SOP (Standar dan Operasi serta Prosedur) pelayanan minimal yang ditetapkan, melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada serta verifikasi capaian operator untuk kemudian mengusulkan pembayaran operator kepada Satuan Kerja (Satker) di Direktorat Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan.

Sampai dengan tahun 2020, lima kota (Palembang, Surakarta, Medan, Yogyakarta, dan Denpasar) telah menggunakan layanan *Buy the Service* dan tahun 2021 ada beberapa kota tambahan (Bandung, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Banyumas, dan Bogor) serta akan berkembang ke kota-kota ataupun kabupaten yang padat penduduk.



TANGGUNG RESIKO

Pemerintah menjadi penanggung resiko penyediaan layanan angkutan dikarenakan tingginya Biaya Operasional Angkutan Massal



PEMBERIAN LISENSI

Pemerintah memberikan lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal



PRIORITAS

Pemerintah memberikan prioritas kepada angkutan umum supaya memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan pribadi

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah agar layanan angkutan memiliki kualitas dan pelayanan prima:



Keamanan

Contoh: Ketersediaan CCTV, ID Card Driver dan Tombol Hazard



Keselamatan

Contoh: SOP Pengoperasian kendaraan, SOP Keadaan Darurat, dll



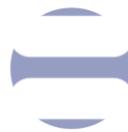
Kenyamanan

Contoh: Suhu dalam bus, kebersihan, lampu penerangan



Keterjangkauan

Contoh: Aksesibilitas, tarif



Kesetaraan

Contoh: Ketersediaan kursi prioritas



Keteraturan

Contoh: Waktu tunggu, kecepatan perjalanan dan waktu berhenti di halte

Setiap pelanggaran terhadap SPM akan diberikan Sanksi berupa pemotongan pembayaran capaian layanan Operator.

F.4 Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO) Pelabuhan Penyeberangan Ajibata-Ambarita di Danau Toba

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan operasional pada Pelabuhan di Kawasan Pariwisata Danau Toba, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional pada Barang Milik Negara di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita di Kawasan Danau Toba pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Perjanjian KSPO BMN dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, sesuai Akta Notaris Perjanjian Kerja Nomor: 08.-

Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-36/MK.6/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara

Pelabuhan Ajibata dan Ambarita di Kawasan Danau Toba pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Kementerian Perhubungan.

Mitra KSP0	PT. ASDP Indonesia Ferry
Jangka Waktu Pemanfaatan	25 tahun
Kontribusi Mitra kepada Negara	<ol style="list-style-type: none"> Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp73.963.814,00, dengan kenaikan sebesar 1,78% per tahun, yang dibayarkan setiap tahun oleh Mitra KSP0 Pembagian keuntungan KSP0 minimal 70,67% dari Laba Bersih. Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP0 harus disetor paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya setelah masa operasi.

Daftar BMN yang dilaksanakan KSP0

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN KERJA SAMA PEMANFAATAN OPERASIONAL									
No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Uraian Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai Wajar (Rp)	Jangka Waktu
Pelabuhan Ajibata									
1	2.01.02.02.002	1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Tanah Pelabuhan Ajibata		2015	10.448	9.548.878.000,00	
2	5.02.04.06.007	2	Bangunan Dermaga	a. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	Jalan Justin Sirait, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	2020	2.056	19.186.296.000,00	25 tahun
				b. Gedung Pos Jaga Permanen		2019	10	21.101.000,00	
				c. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	10	21.781.000,00	
				d. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	24	68.042.000,00	
				e. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)		2020	43	150.408.000,00	
				f. Bangunan Rumah Genset		2020	43	165.516.000,00	
				g. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	9	161.565.000,00	
				h. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	9	24.902.000,00	
				i. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	6	254.045.000,00	
				j. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	14	38.579.000,00	
			k. Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya		2020	280	830.116.000,00		
Pelabuhan Ambarita									
3	5.02.04.06.007	3	Bangunan Dermaga	a. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samsir, Provinsi Sumatera Utara	2020	1.542	20.857.886.000,00	25 tahun
				b. Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Lainnya		2020	99	237.034.000,00	
				c. Bangunan Dermaga		2020	948	67.057.392.000,00	
Jumlah								172.008.869.000,00	

Besaran Kontribusi Tetap KSPO BMN

Besaran Kontribusi Tetap :	Rp2.303.657.772,00
Kenaikan Per Tahun :	1,78%
Peresentase Profit Sharing :	70,67%

Tahun Ke-	Tahun KSPO	Nilai Kontribusi Tetap (Rp)	Tahun Ke-	Tahun KSPO	Nilai Kontribusi Tetap (Rp)
1	2022	73.963.814,00	14	2035	93.031.731,00
2	2023	75.280.370,00	15	2036	94.687.696,00
3	2024	76.620.360,00	16	2037	96.373.137,00
4	2025	77.984.203,00	17	2038	98.088.578,00
5	2026	79.372.321,00	18	2039	99.834.555,00
6	2027	80.785.149,00	19	2040	101.611.610,00
7	2028	82.223.124,00	20	2041	103.420.297,00
8	2029	83.686.696,00	21	2042	105.261.178,00
9	2030	85.176.319,00	22	2043	107.134.827,00
10	2031	86.692.458,00	23	2044	109.041.827,00
11	2032	88.235.583,00	24	2045	110.982.772,00
12	2033	89.806.177,00	25	2046	112.958.265,00
13	2034	91.404.727,00	Jumlah		2.303.657.772,00

F.5 Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) *Proving Ground* pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Pembangunan pengujian kendaraan bermotor berstandar ASEAN MRA melalui Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) *Proving Ground*, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kendaraan untuk keselamatan dan kelaikan jalan;
2. Melestarikan lingkungan dari pencemaran akibat emisi kendaraan;
3. Menyelaraskan persyaratan teknis produk otomotif antar negara ASEAN;
4. Meningkatkan ekspor melalui Persetujuan Jenis produk otomotif yang saling mengakui ASEAN.

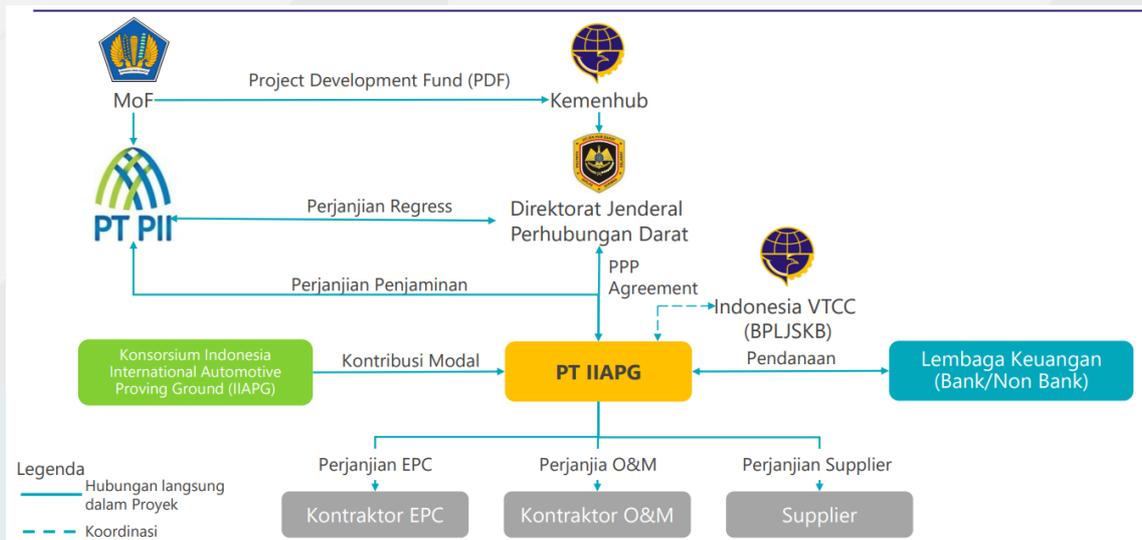
Penanggung Jawab Proyek (PJPK)	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan
CAPEX	Rp 1,98 triliun
Project IRR	8,89 %
Approx. AP	Rp 339,9 miliar per tahun
Area Coverage	BPLJSKB area di Bekasi
Periode Kerjasama	17 tahun (2 tahun periode konstruksi dan 15 tahun periode <i>Operating and Maintenance</i>)
Lingkup Kerjasama	1. Merancang dan pembangunan Fasilitas Pengujian dan Fasilitas Penunjang

	2. Pengadaan Peralatan Pengujian dan Fasilitas Penunjang 3. Pemeliharaan Fasilitas 4. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan)
Skema KPBU	Design Build Finance Maintenance Transfer (DBFMT); pengembalian investasi melalui <i>Availability Payment</i> (AP)

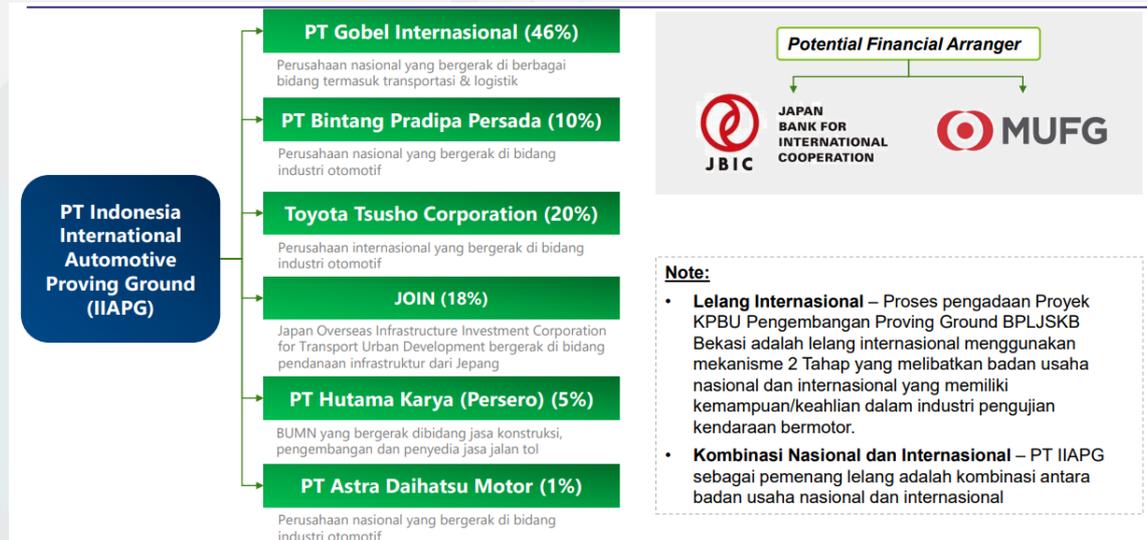
Lingkup Proyek KPBU

						
Layanan	Desain	Membangun	Pendanaan	Pemeliharaan	Operasi	Transfer
Peralatan Pengujian	✓	✓	✓	✓		✓
Fasilitas Pengujian	✓	✓	✓	✓		✓
Fasilitas Pendukung	✓	✓	✓	✓		✓
Sistem Informasi Manajemen Proving Ground	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelatihan	✓		✓		✓	

Struktur Proyek KPBU



Profil Anggota PT. IIAPG



F.6 Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah sebagai berikut:

a. Terminal Tipe A

Sudah Register	Proses Peralihan	Verifikasi Aset	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Kewenangan BPTJ	Total Terminal Tipe A
107	3	2	4	20	9	145

Dari 145 Terminal Tipe A, terdapat 107 Terminal Tipe A yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir, 3 Terminal Tipe A dalam proses peralihan menjadi BMN, 2 Terminal Tipe A masih pada tahap proses verifikasi aset. Selanjutnya, terdapat 4 Terminal Tipe A yang sedang pada proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 29 Terminal Tipe A tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
1	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
2	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang	wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
3	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kalideres	
4	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Barangnangsiang	
5	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi	
6	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Terminal Kalijaya Cikarang	
7	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar	
8	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad	
9	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	Terminal Pondok Cabe	
10	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	Terminal Majene	
11	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	Terminal Gianyar	
12	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	Terminal Banyuasri	
13	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	Terminal Kota Bangun	
14	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	Terminal Arga Makmur	
15	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	Terminal Penyabungan	
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
17	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Terminal Sungai Penuh	Terminal beralih fungsi menjadi kantor Pemerintah Kota Sungai Penuh
18	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Terminal Cicahem	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
19	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Terminal Sapen	Terminal beralih fungsi menjadi SPBU
20	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Terboyo	Terminal beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan barang
21	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	Terminal Banjarnegara	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
				Pemerintah Prrovinsi Jawa Tengah
22	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Situbondo	Terminal Situbondo	Teminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Prrovinsi Jawa Tengah
23	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pamekasan	Terminal Ronggosukowati	Teminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
24	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Barat	Terminal Sweta	Terminal beralih fungsi menjadi lahan kosong
25	Provinsi NTT	Kabupaten Belu	Terminal Motoain	Terminal beralih fungsi menjadi kantor PLBN
26	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Malalayang	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B. Sudah digantikan oleh terminal Liwas
27	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	Terminal Karangasem	Merupakan Terminal Tipe C
28	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	Terminal Muara Enim	Setelah dilakukan evaluasi teknis oleh tim teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Terminal Regional Muara Enim dinyatakan tidak layak sebagai Terminal Tipe A. saat ini terminal hanya digunakan sebagai lahan parkir
29	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	Terminal Padang Bulan	Berdasarkan Surat No 550/5/28/Dishub/2018 Pemkab Labuhan Batu akan menggunakan terminal tersebut sebagai perkantoran organisasi perangkat daerah Kab Labuhan Batu serta menyarakan kemenhub untuk mencari lahan pengganti guna dibangun Terminal Tipe A

b. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Total UPPKB
125	7	2	1	6	141

Dari total jumlah 141 UPPKB, terdapat 125 UPPKB yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir pada Lampiran Vb, terdapat 7 UPPKB yang sedang proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), 2 UPPKB yang masih dalam proses Inventarisasi Akhir (Proses Penyusunan BAST), 1 UPPKB masih dalam proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 6 tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Nama UPPKB	Justifikasi
1	Riau	Tarantang Manuk	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Palalawan, akan beralih fungsi.
2	Jawa Tengah	Butuh	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo, Sudah Tidak Beroperasi.
3	Jawa Tengah	Tugu	Lahan Milik Pemerintah Kota Semarang, akan beralih fungsi.
4	Jawa Tengah	Katon Sari	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Demak, Sudah Tidak Beroperasi.
5	Bengkulu	Air Sebakul	Lahan Milik Pemerintah Kota Bengkulu. Lokasinya tidak strategis sehingga tidak efektif untuk dioperasikan. UPPKB akan beralih fungsi.
6	Sulawesi Utara	Amurang	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, akan beralih fungsi.

F.7 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Dalam rangka penyediaan sarana perhubungan darat khususnya terkait penyediaan angkutan jalan dan penyeberangan, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerjasama sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan Kapal Penyeberangan dan Bus. Penyertaan Modal Negara berupa Kapal Penyeberangan akan dioperasikan oleh PT. ASDP

Indonesia Ferry (Persero) dan Bus akan dioperasikan oleh Perusahaan Umum DAMRI. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Tahun	Unit	Jumlah Nilai
1	Perum Damri	2015, 2016, 2018, 2020	557	444.595.320.000
2	Perum Damri	2018	23	16.225.500.000
3	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2018 s.d 2022	10	389.299.399.385
Total			590	850.120.219.385

Proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	BUS		KAPAL	
	Kuantitas	Nilai Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan
I. PROSES PMPP				
Penghapusan				
Serah Terima PMPP				
Terbit Peraturan Pemerintah PMPP				
Terbit Persetujuan Pemindahtanganan	580	460.820.820.000	10	389.299.399.385
Proses Permohonan Persetujuan				
Usulan Permohonan Persetujuan				
SUBTOTAL	580	460.820.820.000	10	389.299.399.385
II. RENCANA PMPP				
Inventarisasi Data Dukung				
Lain-Lain				
SUBTOTAL				
TOTAL	580	460.820.820.000	10	389.299.399.385

1. Barang Milik Negara dalam Proses PMPP

Dari sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) unit bus senilai Rp460.820.820.000 yang diserahkan kepada Perum DAMRI dan 10 (sepuluh) unit kapal penyeberangan senilai Rp389.299.399.385 yang diserahkan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah terbit

persetujuan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme PMPP antara lain sebagai berikut:

- a) 557 (lima ratus lima puluh tujuh) unit bus Tahun 2015, 2016, 2018, 2020 senilai total Rp444.496.200.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024;
- b) 23 (dua puluh tiga) unit bus Tahun 2018 senilai Rp16.225.000.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-497/MK.6/2024 tanggal 4 Juli 2024;
- c) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Sultan Murhum II** senilai Rp39.334.438.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-736/MK.6/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- d) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Bahtera Nusantara 01** senilai Rp89.673.870.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-320/MK.06/2024 tanggal 3 Mei 2024;
- e) 4 (empat) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Takabonerate, KM Emfote, KM Itaufili, dan KMP Binar** senilai Rp73.760.834.735 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-319/MK.06/2024 tanggal 3 Mei 2024;
- f) 2 (dua) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Tirus Meranti dan KMP Bahtera Nusantara 03** senilai Rp129.377.120.650 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024;
- g) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan berupa **KMP Puteri Leanpuri** senilai Rp25.583.928.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024; dan

- h) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada KSOPP Danau Toba berupa **KMP Kaldera Toba** senilai Rp31.569.208.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024.

F.8 Monitoring To Do List pada aplikasi MonSAKTI

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi melalui aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) Tingkat UAPPA-E1 atas pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Akun dengan Kode Barang Persediaan, yang sudah ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagaimana terlampir; dan
2. Ketidaksesuaian Akun dengan Kode Barang BMN, yang sudah ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagaimana terlampir.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

2024



(021) 3506138, 3506129



AKUNTANSIHUBDAT@GMAIL.COM



GEDUNG KARYA LT. 12,
JL MEDAN MERDEKA BARAT NO 8, JAKARTA



[HTTPS://HUBDAT.DEPHUB.GO.ID](https://hubdat.dephub.go.id)